

ISSN NO. 0853-5922

ekstensia

VOLUME 4 TAHUN III, AGUSTUS 1996

Babak Baru Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

NAK-PERNIK KEHADIRAN SKB MENDAGRI-MENTAN 1996

dan
nusia

M1
EKS

ekstensia

majalah penyuluh pertanian

Diterbitkan berdasarkan
SK. Menteri Pertanian No. 755/Kpts/KP. 150/10/94

Pelindung *Sekretaris Jenderal
Departemen Pertanian*

Pengarah *H. Rochajat Harun*

Tim Penyunting
*Ketua Zahir Zachri
Sekretaris Agus Hariyadi
Anggota Godlim Panggabean
Andi Sumarga
Ranny Mutiara
Basuki Setiabudi
Bram Joko Santoso
Ratna Andaya
Sri Hartati
Yulia Tri Sedyowati*

Perwajahan *El Suherly
Suparman
Suhermanto
Dwihayanti
A. Erniati*

**Administrasi dan
Distribusi** *IG.K. Swastika
Yaya Sofyan
Riza Fakhrizal
Asep Sukandar
Sarmidi*

Alamat *Pusat Penyuluhan Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung A Lantai III, Jakarta 12550
Telp. 7804226, 7806131-34 ext. 2310
Fax. 7804226*

Salam ekstensia,

Selamat jumpa lagi di Volume 4 1996 dan salam sejahtera.

Agak terlambat memang kehadiran *ekstensia* kali ini, banyak surat maupun dering telepon ke meja redaksi menanyakan hal ini. Untuk itu *ekstensia* mengucapkan terima kasih atas perhatian anda. Mohon maklum, jumlah personil yang terbatas dan volume kegiatan lain yang makin meningkat, menyebabkan kami "*super*" sibuk.

Rekan penyuluh dan pembaca *ekstensia* yang budiman.

SKB Mendagri-Mentan No. 54/96 dan No. 301/Kpts/LP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang selama ini sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak, kini telah diluncurkan ke seluruh persada tanah air tercinta.

Kehadirannya yang bersamaan dengan kelahiran INPRES Dana Bantuan PPL '96, ternyata dalam realisasi pelaksanaannya tidak selancar seperti yang diharapkan.

Kendati upaya diseminasi/pemasyarakatan telah dilakukan ke seluruh provinsi, namun yang merebak di kemudian justru semakin menghangatnya polemik lengkap dengan segala pernak-pernik berbagai argumentasi, interpretasi, asumsi dan juga prediksi-prediksi mengenai kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi.

Sungguh, sebuah dinamika dalam berjuta keragaan perbedaan pendapat, alangkah sayang bila dilewatkan begitu saja. Karenanya, kali ini *ekstensia* tampil dalam ***edisi khusus*** untuk menangkap riak-riak perbedaan pendapat yang banyak terkuak ketika berbagai kepentingan saling mendesak.

Kali ini, anda kami ajak untuk sejenak menyimak riak-riak yang terkuak itu, tentu dimaksudkan agar kita bisa menjadi semakin bijak.

Selamat menyimak.

Redaksi

GAPURA 1

Selamat Datang Tantangan Baru 4

**JENTERA** 5

**BABAK BARU
PENYELENGGARAAN
PENYULUHAN PERTANIAN** 5

Salinan SKB
Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pertanian 1996 31

**CAKRAWALA** 41

**Mendinamisasikan Partisipasi Kelompok Tani-Nelayan
dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian** 41

Aida Vitayala Sjafri Hubeis

**Pengalaman Sistem Kerja Penyuluh
di Wilayah Sawit Dupa** 53

M. Yunus Jarmie

**JENDELA** 61

DAFTAR ISI

65 CENGERAMA

65 Penyuluh Pertanian, hendak dibawa kemana?

67 Pewilayahan Penyuluhan Pertanian
Ir. Machmud Tan

73 Penyuluhan Pertanian,
di antara Harapan dan Kenyataan
Kelompok Penyuluh Pertanian, Palangkaraya



77 CERMIN

77 *Djoko Purwanto*
Dulu Penyuluh pernah jadi idola



83 SSST.....

83 KONGRES PERHIPTANI III,
Dudung A Adjid
Kembali Menjadi Ketua

88 Pekan Tani Asean VI di Thailand



91 CELOTEH

91 Pokok Pikiran tentang Pembinaan Kelompok Tani

92 Tantangan Baru Bagi KTNA

93 WACANA

97 A...EKSTENSI

97 Ambisi Majudi

Selamat Datang, Tantangan Baru

Pucuk dicinta ulam tiba , barangkali itulah ungkapan yang tepat terhadap kehadiran Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Sebagai jawaban dari berbagai pilihan konseptual yang dilontarkan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian, maka dalam SKB ini terjadi perubahan besar yang menuntut konsentrasi ekstra dari setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Menempatkan petani sebagai primadona bahkan sebagai pengelola dari satu kelembagaan yang bernama Balai Penyuluhan Pertanian, tuntutan yang semakin tinggi terhadap kemampuan para penyuluh, kehadiran institusi baru Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian(BIPP). Bukankah ini merupakan suatu perubahan besar?

Kita sering berpikir perubahan yang terjadi sekarang ini terasa terlalu cepat, kadang membuat kita terperangah, bahkan terkaget-kaget, kalau kita terlalu lama tertegun, kita bisa tertinggal. Tapi apabila kita terlalu cepat menyimpulkan , lalu bertindak tanpa pikir panjang, kadang malah bisa terjadi langkah-langkah yang keliru.

Begitu halnya dengan SKB, banyak yang menganggap sebagai suatu langkah yang terlalu cepat dengan bobot yang sarat dengan perubahan yang tidak hanya menyangkut operasionalisasi tetapi juga ketenagaan, sistem kerja dan kelembagaan dengan menempatkan desentralisasi daerah tingkat II sebagai poros penggerak dinamika penyelenggaraannya.

Masa transisi untuk mencapai berjalannya SKB ini secara ideal memang perlu waktu dan sekian banyak penyesuaian, yang diperlukan sekarang adalah "kepekaan membaca peta" baik secara faktual maupun ancangan ke depan sebagai konsekuensi kehadiran produk hukum tersebut. Ini suatu pengetahuan yang terkadang tidak semua pihak memahaminya dengan baik tetapi kedudukannya menjadi sangat penting dan strategis.

Sebab melalui kepekaan membaca peta inilah hal-hal yang dirasa kompleks, rumit, serta memangsa waktu , konsentrasi dan dana bisa dihindari. Pendeknya kepekaan membaca ini sedikit banyak membuat kita menjadi lebih arif.

Kehadiran suatu produk hukum tentunya haruslah menjadi suatu kerangka dari perbaikan yang dibangun oleh seluruh pelaku yang terlibat, jangan membayangkan dengan kehadiran SKB kita akan mendapatkan segalanya , lalu memunculkan berbagai tuntutan untuk menyelesaikan segalanya dengan segera, tanpa kita sendiri ikut berkiper basbas menjadi pelaku aktif.

Kita mesti meneropong secara cermat dengan penuh kearifan terhadap pelaksanaan SKB ini, akan banyak hal yang menarik yang bisa dijadikan bahan untuk kita telaah. Kuncinya , kerja keras dan melakukan yang terbaik. Sudah siapkah kita?

ranny mutiara

Babak Baru Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

PERNAK-PERNIK POLEMIK DIBALIK KEHADIRAN SKB MENDAGRI-MENTAN 1996

Setelah sekian lama menanti dengan penuh harap ditengah berbagai suara yang menuding lesunya penyuluhan pertanian dewasa ini, akhirnya terbitlah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 tanggal 10 April 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Benarkah ini merupakan angin segar serta jawaban dari revitalisasi penyuluhan pertanian?

Konsepsi Revitalisasi Penyuluhan Pertanian yang digelar oleh Pusat Penyuluhan Pertanian rupanya telah memperoleh jawaban yang mengembirakan sekaligus melegakan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 tanggal 10 April 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Betapa tidak, satu dua tahun ke belakang sebelum lahirnya SKB dunia penyuluhan pertanian sangat santer membicarakan "kemelut stagnasinya penyuluhan pertanian", dan suara di hampir seluruh persada tanah air "menuntut" untuk meninjau kembali Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 1991 dan

Nomor 539/Kpts/LP.120/7/96 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah.

Tuntutan terhadap perubahan ataupun penyempurnaan SKB tersebut terutama dialamatkan kepada Pusat Penyuluhan Pertanian sebagai kelembagaan yang menangani penyuluhan pertanian, hampir di setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian baik secara formal maupun non formal harapan-harapan untuk ditinjau dan dipertimbangkannya kembali keberadaan SKB Mendagri-Mentan 1991 selalu diungkapkan terutama oleh para penyuluhnya sendiri.

Kesimpulan umum dari pemberlakuan SKB Mendagri-Mentan 1991 adalah terjadinya perbedaan interpretasi dan persepsi pada berbagai pihak terhadap penyelenggaraan

penyuluhan pertanian di daerah yang ujung-ujungnya menimbulkan penurunan kualitas atau degradasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Merebaknya masalah ini, tidak membuat Pusat Penyuluhan Pertanian berpangku tangan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya maka berbagai pengkajian dan seminar serta lokakarya baik dengan para pakar penyuluhan pertanian maupun para praktisi di tingkat pusat maupun daerah telah dilakukan untuk memperoleh berbagai masukan terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang mampu mengakomodasikan harapan serta tuntutan tadi, sekaligus berorientasi kepada tantangan masa kini dan masa depan.

Sekarang, harapan atau tuntutan tersebut telah terealisasikan dengan lahirnya SKB Mendagri dan Mentan Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 310/Kpts/LP.120/4/96. Itulah selintas kilas balik seputar kelahiran SKB-96.

Berbagai upaya untuk memasyarakatkan SKB Mendagri-Mentan 1996 inipun telah dilakukan, antara lain melalui Temu Konsultasi Penyuluhan Pertanian pada bulan Mei 1996 yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian dan Kepala Bidang Sumberdaya Kanwil Deptan, dilanjutkan dengan pelaksanaan Diseminasi SKB dan Inpres Bantuan PPL ke seluruh provinsi di Indonesia dengan menghadirkan seluruh Assisten Sekwilda Tingkat II, Kepala-kepala Dinas lingkup Per-

tanian di Tingkat I, serta Penyuluh Pertanian di tingkat provinsi.

Secara tertulis juga telah dilayangkan Surat Edaran dari Menteri Pertanian kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia dan juga tidak ketinggalan Surat Kabar Sinar Tani memuat dengan lengkap SKB Mendagri-Mentan 1996 serta Pedoman Inpres Bantuan PPL sebagai suplemen dalam salah satu edisi terbitannya.

Apabila dilihat dari upaya pemasyarakatan SKB Mendagri-Mentan 1996 yang telah dilakukan, kelihatannya sudah cukup optimal, namun demikian bila disimak dari pelaksanaan penerapannya di daerah tampaknya hanya berupa riak-riak kecil saja, belum menunjukkan adanya gerakan merealisasikan penerapannya. Kecenderungan yang tampil ke permukaan adalah masih adanya kesan "menunggu" petunjuk lebih lanjut dari SKB tersebut.



Esensi SKB Mendagri-Mentan 1996 : Desentralisasi, Dekonsentrasi dan peningkatan peran petani-nelayan

Untuk bisa memahami isi batang tubuh SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/4/96 Tanggal 10 April 1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, seyogyanya diawali dengan mencoba memahami dasar-dasar pertimbangan yang melatar belakangi kelahiran SKB tersebut. Ada 2 (dua) hal pokok yang patut disimak lebih mendalam sebagai latar belakang yaitu:

Pertama, pertimbangan mengenai pelaksanaan "*asas Desentralisasi Penyuluhan Pertanian*", yakni penyerahan sebagian urusan penyuluhan pertanian menjadi urusan rumah tangga daerah, sekaligus dengan pelaksanaan "*asas Dekonsentrasi*" dalam penerapan

desentralisasi penyuluhan pertanian di daerah yakni pengaturan penyelarasan penyelenggaraan penyuluhan di daerah yang didasarkan pada kebijaksanaan dan bimbingan dari Pemerintah Pusat.

Penerapan asas Desentralisasi dan Dekonsentrasi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan salah satu unsur yang diatur dan ditata dalam SKB Mendagri-Mentan 1996. Ini dimaksudkan agar dapat menciptakan keterkaitan dalam suatu jaringan kesisteman kerja yang utuh dan terpadu antara Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan program-program Pembangunan Pertanian.

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993, telah mengamanatkan bahwa peran aktif masyarakat dalam pembangunan perlu dikembangkan melalui pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada Daerah, khususnya Daerah Otonom



WASPADAI MASA TRANSISI !

Ir. Yoma Handam

SPH BIMAS
KOTAMADYA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

Hadirnya SKB, tampaknya kondisi penyuluhan akan makin mantap, namun demikian perubahan yang dijanjikan SKB itu sendiri cukup drastis.

Menurut pengalaman saya, perubahan peraturan ini mempunyai konsekuensi, yaitu masalah transisi tentang pelaksanaan peraturan. Kita harus bisa mengantisipasi agar masa transisi ini tidak menimbulkan stagnasi.

Tingkat II, dengan tetap mengacu kepada arah dan tujuan Pembangunan Nasional dan pada perwujudan Wawasan Nusantara.

Penetapan arah dan tujuan Pembangunan Pertanian secara nasional menjadi tanggung jawab Menteri Pertanian, dan mengingat penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak pembangunan pertanian maka meskipun sebagian urusan penyuluhan ini telah diserahkan kepada daerah, masih tetap diperlukan satu kesisteman kerja dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang selaras, serasi dan terpadu antara Pusat dan Daerah yang mampu menjamin penyelenggaraan serta keberhasilan pelaksanaan Program-program Pembangunan Pertanian.

Esensi yang kedua dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 ini, adalah penekanan dan penajaman terhadap arah dan tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Pada klausul Menimbang butir (b) disebutkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilakukan dalam rangka menumbuh-kembangkan swadaya dan peran serta petani-nelayan dalam kegiatan usaha dan pembangunan pertanian.

Arah dan tujuan penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini pulalah yang mendasari terjadinya perubahan-perubahan yang cukup mendasar di dalam pengaturan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan serta penata laksanaan penyuluhan pertanian.

Amanat dalam GBHN 1993, juga menyebutkan bahwa kemampuan masyarakat desa untuk memproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya.

Sifat usaha dalam era agribisnis dewasa ini dan era globalisasi di masa mendatang merupakan tantangan yang harus dijawab oleh penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. Sehubungan dengan hal itu maka Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan peranannya perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan sifat, arah dan tujuan penyuluhan pertanian serta tuntutan kebutuhan belajar-mengajar para petani nelayan dalam pengembangan usahanya.

Kedua hal pokok yang dijadikan pertimbangan kelahiran SKB Mendagri-Mentan 1996 inilah yang perlu dipahami dan dihayati dengan kesamaan persepsi oleh semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Tanpa kesamaan persepsi dari semua pihak, maka berbagai perubahan yang terjadi pada kelembagaan, ketenagaan dan ketatalaksanaan penyuluhan pertanian seperti yang tertuang di dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 akan sulit untuk dimengerti dan mungkin juga sulit untuk diterima.

Performansi Petani-nelayan dalam Era Penyuluhan Pertanian Masa Kini dan Masa Datang.

(Benarkah SKB Mendagri - Mentan 1996 kurang mengungkap masalah petani - nelayan dan keluarganya)

Di balik riak riak kecil dalam penerapan SKB Mendagri - Mentan 1996 di Daerah, ternyata menyimpan beragam silang pendapat serta berbagai komentar yang cukup marak di berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, para pemerhati maupun para ilmuwan. Salah satu komentar diantaranya datang dari DR. Aida Vitayala, Ketua Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Pasca Sarjana IPB, yang berkomentar : "*SKB 96 ini tampaknya kurang mengungkap masalah petani*" Komentar lain datang dari Ir. Salmon Padmanagara, pakar penyuluhan pertanian : "*SKB 96, masih sibuk mengatur diri sendiri, mengatur aparatur, kelembagaan, tata laksana kerja dan para penyuluhnya sendiri, mana petaninya ?*" Benarkah ?

Penyuluhan Pertanian menurut SKB Mendagri-Mentan 1996, didefinisikan sebagai *sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian, agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran*

sertanya dalam pembangunan pertanian.

Menyimak pengertian ini, tampak jelas bahwa penyuluhan pertanian membawa misi pendidikan bagi petani-nelayan dan keluarganya untuk mampu membangun dinamika dan kemampuan petani-nelayan agar mampu berswadaya dan mandiri dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya agar mampu berkiprah dalam pembangunan. Pada Keswadayaan dan Kemandirian petani-nelayan itulah penyuluhan pertanian diarahkan. Hal ini sejalan dengan Klausul Menimbang Butir (b) seperti telah diungkap di atas.

SKB Mendagri-Mentan 1996 menjelaskan pengertian Program Penyuluhan Pertanian sbb. : *Programa penyuluhan pertanian adalah rencana penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun.*

Bagian inipun menekankan kembali bahwa sistem kerja penyuluhan pertanian harus mengacu pula pada *aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian*, hal ini sudah barang tentu harus diartikan bahwa sistem kerja penyuluhan pertanian harus mengarah pada upaya menggali dan mengolah *aspirasi petani nelayan* agar mampu tumbuh menjadi *prakarsa*, dan selanjutnya penyuluhan

pertanian harus mampu memberikan responsnya yang positif agar *prakarsa petani-nelayan* tumbuh menjadi *dinamika internal masyarakat pertanian* yang sangat diperlukan dalam iklim agribisnis dan era globalisasi.

Sebagai *payung*, sebenarnya SKB Mendagri-Mentan 1996 telah memberikan peluang yang cukup besar bagi pengembangan keswadayaan, kemandirian dan peran aktif petani-nelayan untuk berprakarsa dan berkiprah dalam pembangunan pertanian.

Barangkali hal ini merupakan jawaban terhadap kekhawatiran yang selama ini banyak diungkapkan oleh beberapa pakar ketika rencana penyempurnaan SKB Mendagri-Mentan 1991 mulai didengungkan. Dalam rumusan SKB Mendagri-Mentan 1996, nuansa kemitraan dicoba dibangun antara petani-nelayan dengan aparat bahkan dalam salah satu pasalnya dengan berani mengarahkan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk dikelola oleh kelompok tani-nelayan.

Isu sentral tentang keberpihakan terhadap kepentingan petani-nelayan ini semakin kuat gaungnya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman. Dan komitmen inilah yang secara konsekuen dijadikan titik tumpu munculnya kebijaksanaan penyuluhan pertanian dalam SKB Mendagri-Mentan 1996.

Bobot berat yang menempatkan petani-nelayan sebagai pemeran sentral dalam pembangunan pertanian memang terasa ideal walaupun ada beberapa nada pesimistis muncul dari sebagian pihak yang seakan tidak percaya bahwa kondisi seperti yang tertuang dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 ini akan dapat terwujud, sekalipun dapat terjadi entah beberapa puluh tahun lagi baru akan terwujud.

Namun demikian, sebuah tonggak memang harus sudah dipancangkan, maka sesuatu yang dirasa terlalu ideal ini haruslah dilihat sebagai suatu tantangan.

Arus globalisasi baik berupa teknologi, informasi maupun per-

Saya masih belum optimis kalau dengan adanya SKB baru ini akan meningkatkan penyelenggaraan penyuluhan, kalau segi-segi lainnya juga tidak diperbaiki sekalian, seperti fasilitas kendaraan bagi penyuluh, itu masih sangat kurang. Walaupun begitu saya akui adanya SKB dan Inpres akan sedikit membantu penyuluh.

BELUM OPTIMIS TERHADAP SKB



Paimin Naibaho

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KAMPAR, RIAU

dagangan bebas telah menghadang di depan mata, tuntutan terhadap terbangunnya sistem agribisnis yang handal dan dinamis sudah harus terwujud pada Pelita VI ini, dan kesemuanya harus dihadapi oleh masyarakat petani-nelayan secara wajar.

Sehingga cerminan yang harus tampil dari kondisi petani-nelayan adalah sosok petani-nelayan yang lebih mandiri, yang mempunyai penghidupan dan kehidupan yang layak sebagai warga negara terhormat di negeri ini.

Semua ini akan dapat terwujud bila petani-nelayan berperan sebagai tuan di lahan usahatannya sendiri.

Secara falsafi memang demikian, seharusnya menempatkan petani-nelayan sebagai sumberdaya potensial dalam pembangunan pertanian, tetapi pada kenyataannya sekarang ini, masih ada anggapan bahwa kondisi masyarakat petani-nelayan masih kurang berdaya, kurang

mampu, sehingga prakarsa dan inisiatif senantiasa masih harus datang dari pihak pemerintah.

Inilah tantangan yang cukup berat yang harus dihadapi dalam operasionalisasi SKB Mendagri-Mentan 1996, di satu pihak kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996 yang dengan begitu arifnya telah menempatkan kedudukan petani-nelayan dalam posisi yang terhormat sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, namun di sisi lain seringkali dijumpai pola ataupun pendekatan program dan proyek pembangunan pertanian yang justru menumbukan ketergantungan bukannya kemandirian.

Dr. Aida Vitayala, dalam makalahnya yang disampaikan pada Simposium Perhptani di Mataram Juli 1996 menyebutkan bahwa selama ini rekayasa sumberdaya manusia acap dianggap kurang strategis oleh mereka yang berpendapat bahwa rekayasa teknologi



NANTI WEWENANG CAMAT, LEBIH BESAR ?

M. Roman Sabangan

CAMAT KECAMATAN PAHANDUT
KOTAMADYA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

SKB Mentan & Mendagri ? Secara faktual belum diterima di tingkat kecamatan !. Namun telah diadakan pertemuan-pertemuan, dan arahan-

arahan, sehingga kami menilai dengan SKB baru ini wewenang camat kan menjadi lebih besar, dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan BPP. Dengan demikian Sekretaris Bimas di tingkat kecamatan, Mantri Tani dan BPP beserta penyuluhnya merupakan satu kesatuan utuh yang dapat merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan pertanian di wilayahnya.

lebih perlu diutamakan dalam pencapaian transformasi inovasi pembangunan. Padahal, kajian empiris menunjukkan bahwa hasil rekayasa teknologi secanggih apapun tidak akan ada manfaatnya jika *tidak dapat* memotivasi orang untuk menggunakan teknologi tersebut.

Dalam hal ini, *media tepat* untuk melakukan alih informasi akan sangat menentukan keberhasilan pendifusian teknologi di masyarakat.

Pada bagian lain dalam makalahnya, Aida juga menyatakan bahwa kekeliruan berikutnya terletak pada kurangnya *intensitas pembinaan, pengaturan, dan perangkulan* kepada khalayak sasaran secara sistematis, sinambung dan holistik. Asumsi yang digunakan oleh pihak pembuat kebijakan sangatlah sederhana yaitu sudah sepatutnya petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian mengikuti anjuran pemerintah untuk mengadopsi teknologi

baru di bidang pertanian karena akan meningkatkan produktivitas yang selanjutnya membantu stabilisasi harga dan distribusi produk pertanian.

Hal lain lagi yang perlu dijadikan perhatian adalah kondisi nyata masih bertumpunya titik berat pembangunan pertanian dalam program mempertahankan swa sembada pangan khususnya beras.

Jelas apabila berbicara mengenai program swa sembada pangan nasional seringkali terjadi benturan kepentingan dan biasanya kepentingan petani direlakan untuk mengalah pada kepentingan yang bersifat makro yang juga mempunyai muatan strategis politis.

Kondisi-kondisi semacam inilah yang harus dicermati dan dicarikan solusi yang tepat, sehingga intervensi dari pemerintah dapat juga ditempatkan sebagai kepentingan petani nelayan dalam proses belajar mengajar masyarakat yang wajar.

Adanya SKB baru tersebut, dinas menyambut biasa saja, karena pada dasarnya SKB yang sekarang mengembalikan ke bentuk penyuluhan lama yaitu polivalen, seperti yang sudah dijalani di kabupaten Kampar sampai sekarang ini. Kehadiran BIPP hanya memperpanjang jalur koordinasi karena Dinas tidak mampu menyuruh penyuluh secara langsung, demikian juga antara Dinas

SKB, BENTUK PENYULUHAN LAMA ?

H. Achyar

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
KABUPATEN KAMPAR, RIAU

dengan BIPP belum tentu ada kesamaan persepsi.

Prof. DR. Herman Soewardi, Guru Besar Sosiologi Pedesaan UNPAD kepada *ekstensia* menyatakan bahwa peranan metodologi penyuluhan lah yang harus mampu untuk memberikan pengertian kepada masyarakat petani-nelayan terhadap berbagai kepentingan makro dan menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kepentingan mereka sendiri.

Cuplikan kecil masalah di atas dan tanggapan para Pakar terhadap kondisi penyuluhan dewasa ini sengaja ditampilkan untuk menjadi perhatian para pengelola dan penyelenggara penyuluhan pertanian dalam membangun kesamaan pengertian dan kesamaan persepsi terhadap kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996 ini.

Di sisi lain, peluang yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para petani-nelayan dalam pelaksanaan SKB Mendagri-Mentan 1996 adalah dengan meningkatkan kualitasnya sehingga mampu berkiprah sebagai mitra sejajar dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian.

“Kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996 ini memang menempatkan petani-nelayan dalam posisi yang penting, bagi kami para KTNA, ini merupakan ujian yang menuntut kami agar lebih pintar, lebih aktif serta lebih menunjukkan bukti yang nyata akan keberhasilan usahatani kami dan peranan kami dalam penyuluhan kepada sesama rekan kami para petani “, demikian ujar H. Sofwan, KTNA Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Indramayu, ketika berdiskusi mengenai masalah peranan KTNA dalam penyusunan Program Penyuluhan Pertanian pada acara Mimbar Sarasehan di Lembang Jawa Barat bulan Juni 96 beberapa waktu yang lalu.

SKB Mendagri-Mentan 1996 memang tidak terlihat secara khusus atau secara ekplisit memuat strategi pembinaan petani-nelayan dan atau pembinaan kelompok-tani-nelayan. Hal ini pulalah yang menimbulkan kesan seolah-olah SKB Mendagri-Mentan 96, ini kurang berorientasi kepada kepentingan petani-nelayan. Padahal bila disimak dari kondisi faktual yang terjadi sekarang, titik



KITA INGIN HATI-HATI

Drs. Nick Betambun

ASISTEN II SEKWILDA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA, MALUKU

Kita ingin hati-hati mengenai pembentukan BIPP ini, kita tidak ingin ada yang tidak terlibat, ataupun terinjak fungsinya dalam membicarakan pembentukan BIPP ini termasuk sarana dan prasarana dan aspek pendanaannya. Sebenarnya kita masih menunggu juklak SKB Mentan-Mendagri itu !

kritis dalam penyelenggaraan pembangunan pertanian bertumpu pada masalah belum mantapnya dinamika dan partisipasi petani-nelayan.

DR. Aida Vitayala mengungkapkan bahwa pengalaman menunjukkan, pembinaan petani melalui pendekatan kelompok baik hamparan maupun domisili secara mengagumkan telah berhasil mencapai swa sembeda beras, namun intervensi program yang terlalu dalam pada proses pengambilan keputusan oleh aparat di tingkat kelompok tani tidak jarang justru menghasilkan ekses-ekses yang tidak diinginkan.

Tunggakan KUT, kelompok tani papan nama, kelompok bubar segera setelah proyek selesai, merupakan fenomena yang terjadi akibat belum terpahaminya tujuan dari berbagai pendekatan dalam pembinaan kelompok tani.

Dalam kaitannya dengan membangun dinamika kelompok tani ini, Dr. Aida Vitayala, pada Simposium Perhiptani di Mataram Juli 1996 lebih lanjut menyatakan bahwa

kesinambungan pembinaan kelompok tani-nelayan pada PJP II terletak pada upaya merevitalisasi dinamika kelompok tani per spesifik *pusat kesamaan perhatian*, yang diantaranya adalah kesamaan unit produksi serta kesamaan jenis komoditas hasil pertanian unggulan atau komoditas spesifik lokasi yang diusahakan.

Aida menyatakan pula bahwa bila kesamaan pusat perhatian ini dikaitkan dengan cara pengelompokan petani se domisili atau sehamparan lahan pertanian akan menghasilkan alternatif kombinasi pembinaan kelompok tani yang lebih berdaya guna dan mungkin juga lebih manusiawi. Jika cara ini akan ditempuh maka jelas diperlukan mekanisme penyuluhan pertanian yang bersifat *multi level, multi arah dan multi tujuan*. Implikasi lanjut ialah perlunya *koordinasi* antar instansi terkait melalui kesinergian, keterbukaan dan keholistikasian pendekatan dalam keterkaitannya dengan otonomisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Konsekuensi logis dari tuntutan orientasi pemeranan kelompok tani

Terbentuknya BIPP ? memang harus segera ! Tetapi menurut pengalaman saya, pasti memerlukan proses yang cukup lama. Seperti Cabang Dinas Tanaman Pangan ini juga prosesnya cukup lama, baru tahun ini Cabang Dinas diresmikan, dikukuhkan !

**BIPP,
PERLU WAKTU
UNTUK DIKUKUHKAN**



H. L. S. Hae Hatma, SE

KEPALA CABANG DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
KOTAMADYA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH



tersebut adalah penelaahan kembali strategi pengembangan kelompok tani sesuai dengan fungsi yang diembannya secara spesifik, tanpa meninggalkan falsafah yang mendasari tumbuhnya kelompok tani sebagai satu unit pembelajaran orang dewasa dalam nuansa kebersamaan tujuan.

Erat kaitannya dengan pengembangan kelompok tani ini adalah posisi strategis kontak tani. Pernyataan yang diungkapkan oleh H. Sofwan, KTNA Jawa Barat tentang peranan kontak tani seperti diungkapkan di atas cukup beralasan mengingat pada SKB Mendagri-Mentan 1996 mensyaratkan peranan aktif dari kontak tani atau KTNA dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian mulai dari penyusunan program penyuluhan pertanian di setiap tingkatan wilayah sampai pada pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Tertuangnya peranan kelompok tani dan KTNA dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 dalam beberapa pasal, pada prinsipnya mengukuhkan peranan dan posisi strategis dari KTNA sebagai mitra penyuluh pertanian sekaligus sebagai penyuluh swakarsa dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayahnya.

Menanggapi peran KTNA sebagai mitra penyuluh, Aida Vitayala pun menyebutkan bahwa untuk bisa memerankan tugas tersebut maka kriteria pemilihan kontak tani haruslah didasarkan pada kemampuannya sebagai petani-pendidik, bukan sebagai petani kaya atau inovator saja.

Karena itu mutlak diperlukan adanya suatu pendidikan bagi kontak tani yang nantinya kontak tani tersebut benar-benar menjalankan fungsinya sebagai mitra penyuluh yaitu sebagai *pendidik petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian lainnya*.

Kehadiran petani-pemandu dalam Program SL-PHT, ber-munculannya P4S di beberapa daerah, ini menunjukkan bahwa peranan petani pendidik akan semakin penting posisinya sebagai mitra penyuluh dan dalam posisinya yang sama sebagai petani akan mem-berikan dorongan yang lebih kuat untuk menumbuhkan kemandirian bagi petani-nelayan sekaligus juga mengurangi ketergantungan kepada aparat.

Bila ditilik dari harapan yang sedemikian besar terhadap peranan kontak tani, maka sudah menjadi keharusan untuk meninjau kembali berbagai model atau pola pengembangan kelompok tani beserta kontak taninya, dan tampaknya hal ini bukanlah pekerjaan mudah. Satu hal yang harus senantiasa diperhatikan dalam merumuskan model atau pola pengembangan kelompok tani dan kontaktani ini seyogyanya tetap konsekuen dan konsisten bertumpu pada falsafah penyuluhan pertanian sebagai landasannya.

Dengan kata lain, kemandirian inilah tuntutan sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh petani-nelayan, kelompok tani-nelayan dan Kontaktani-nelayan untuk bisa tetap bertahan dalam derasnya arus globalisasi dan perdagangan bebas yang diwujudkan dalam sikap berencana, optimalisasi potensi sumberdaya dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dengan nuansa kemampuan dan kebebasan untuk menentukan serta mengambil keputusan secara mandiri dan rasional.

Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP)

(Harapan Baru atau Problema Baru atau Harapan Baru yang Problematis atau Problema Baru yang Memberi Harapan ?)

Dibentuknya Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di seluruh Kabupaten dan Kotamadya Daerah Tk.II seperti tertuang dalam SKB Mendagri dan Mentan Tahun 1996, ternyata telah menimbulkan polemik yang penuh dengan pernak pernik perbedaan persepsi dan interpretasi yang didorong oleh adanya berbagai perbedaan argumentasi, aspirasi dan kepentingan sampai kepada prediksi akan akibat yang akan mencuat.

Kelahiran SKB Mendagri - Mentan 1996, terutama yang menyangkut pembentukan BIPP telah disambut dengan berbagai tanggapan, silang pendapat, pro dan kontra serta menjadi pembicaraan hangat di Daerah.

"Pembentukan BIPP dengan 15 tugas fungsinya itu, tumpang tindih dengan tugas fungsi Dinas Otonom".

"Pembentukan BIPP sama dengan mempreteli tugas fungsi Dinas Otonom, tidak sesuai dan tidak sejalan dengan Perda".

"Menyimpang dari prinsip desentralisasi".

"Suatu intervensi Pusat yang terlalu jauh ke bawah".

"BIPP dalam SKB '96 tidak tuntas. Membuat penyuluh terpojok dan terpuruk dalam kebingungan

untuk bersikap, dan dalam posisi serba salah".

"Jangan biarkan penyuluh terlalu lama dalam ketidak-pastian ini".

"BIPP, terlalu ambisius dan kurang menapak pada realita, tidak mudah mengubah organisasi secara tuntas" dan banyak lagi komentar yang bernada kurang menyetujui dibentuknya BIPP di Daerah Tk.II.

Dari sekian banyak nada yang mempertanyakan atau kurang menyetujui dibentuknya BIPP ini, namun banyak pula suara-suara yang menyambutnya dengan antusias dan mendukung pembentukannya. "Pembentukan BIPP merupakan wadah baru bagi terwujudnya kesatuan pengertian, kesatuan kelembagaan penyuluhan pertanian dan kesatuan korps penyuluh pertanian yang sangat diperlukan dewasa ini".

"BIPP sebuah harapan baru, babak baru penyuluhan pertanian dan sekaligus merupakan tantangan baru bagi eksistensi dan kredibilitas penyuluh pertanian".

"BIPP, ini yang kita tunggu dari dulu tapi perlu segera ditindaklanjuti" Begitulah nada-nada optimistik di Daerah dalam menyambut kehadiran BIPP.

Namun demikian, di antara kedua kubu pendapat yang sangat antagonis inipun banyak pula muncul suara-suara yang bernada skeptik dan cenderung pesimis :

"BIPP ? Ah, tak perlu dikomentari, kita lihat saja hasilnya nanti".

"BIPP, inilah yang membuat kami bingung Penyuluhan pertanian ini sudah terlalu sering digonjanganjangan dan menjadi kelinci percobaan".

"Kita tunggu saja hasilnya nanti, tokh nasib para penyuluhnya masih tetap begini-begini saja".

"Semua ini hanya ambisi para ahli dan para penguasa saja yang ingin eksis dengan segala macam konsepnya, Yang repot kan kami kami ini yang ada di Daerah"



PERLU ADA PEMBAKUAN !

B. Simanjuntak, B.Sc.

KEPALA CABANG DINAS PERKEBUNAN
KOTAMADYA PALANGKARAYA, KALIMANTAN TENGAH

Para penyuluh yang akan kembali dalam satu wadah BIPP, saya pikir itu bagus ! Tetapi diingat pengalaman terdahulu tentang penempatan para penyuluh itu sendiri. Hingga sekarang rasanya belum ada pembakuan, berapa sebenarnya yang optimal di WKPP, di BPP, di Kabupaten, dst.

Apa yang menjadi dasar untuk memutuskan penempatan para penyuluh ?

Keras, tajam dan cukup *nylekit* bukan ? Tapi inilah potret lapangan, inilah fakta yang mencuat di Daerah. Keragaan perbedaan pendapat, keberbagaian ungkapan sikap, keterbukaan letupan perasaan, semua ini merupakan cerminan dinamika yang masih tumbuh dalam kehidupan penyuluhan pertanian yang pada akhir-akhir ini dinilai sementara orang tengah mengalami stagnasi atau malah degradasi. Kesemuanya ini perlu ditempatkan sebagai kondisi potensial bagi lahirnya era kebangkitan kembali penyuluhan pertanian dengan kebijaksanaan Revitalisasinya.

Berapa lama lagi polemik dengan segala pernak-pernik-nya akan berlangsung, dan kapan akan beralih menjadi gerakan nyata mewujudkan penerapan kebijaksanaan ini dalam kesatuan gerak langkah di Daerah ? Dari pengamatan *ekstensia*, rupanya di Daerah masih ada kesan untuk menunggu petunjuk lebih lanjut. Karenanya, sekali lagi Pusat Penyuluhan Pertanian diharapkan

dapat segera memprakarsai untuk mencari solusi yang tepat dan cepat dalam mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya keragaan perbedaan pendapat yang akan berakibat pada penerapan kebijaksanaan yang terlambat.

Upaya diseminasi pemasyarakatan SKB dan Inpres BPPL ke seluruh provinsi yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, ternyata kurang efektif dan belum mampu membangun kesamaan persepsi di Daerah.

Keterlambatan realisasi pelaksanaan pencairan Inpres Dana Bantuan PPL dan kelambanan dengan keberbagaian tindakan dalam merespons SKB Mendagri-Mentan 1996, serta merebaknya polemik perbedaan pendapat yang semakin mencuat di Daerah memerlukan tindakan antisipasi yang cepat dan akurat. Diperlukan analisis yang tepat terhadap berbagai hambatan dan kendala yang menyebabkan terwujudnya kondisi di atas di tingkat Daerah.

Dilepasnya penyuluh dari dinas/instansi dan secara bertahap ke dalam satu "sarang" kelembagaan BIPP, memang ada hal yang harus diwaspadai, agar meskipun secara kelembagaan terpisah dari dinas/instansi sebagai penanggung jawab program, maka harus ada pola hubungan kerja yang selalu menciptakan kegiatan-kegiatan merekatkan para penyuluh dengan program itu sendiri.

PERLU POLA HUBUNGAN KERJA YANG MEREKATKAN



Ir. A. Marasaberry

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH, MALUKU

Keberbagaian sikap dan tindakan Daerah dalam pelaksanaan penerapan SKB Mendagri - Mentan 1996 dan realisasi pencairan Dana Inpres Bantuan PPL, menunjukkan masih terdapatnya perbedaan persepsi dan perbedaan interpretasi terhadap kedua produk Kebijaksanaan di atas.

Keberbagaian sikap dan tindakan Daerah ini dapat terlihat dari keragaan dalam hal Pembentukan BIPP dan Pemilihan Pimpro Inpres

BIPP sebagai kelembagaan yang mandiri dan terpisah dari Satuan Pelaksana BIMAS. Keragaan model BIPP dari dua kasus di atas telah mencuatkan pula perbedaan pendapat di kalangan para penyelenggara penyuluhan pertanian.

Sebagian berpendapat bahwa perangkapan BIPP dengan Satpel BIMAS merupakan tindakan yang kurang tepat, sebab BIPP seharusnya merupakan cikal bakal yang akan

perbedaan persepsi dan interpretasi serta perbedaan kepentingan akan menjadi kendala utama pembentukan BIPP, selain legitimasi landasan hukumnya itu sendiri.....

Dana Bantuan PPL. Di provinsi NTB misalnya, yaitu salah satu provinsi yang telah merespons SKB Mendagri - Mentan 1996 dalam hal pembentukan kelembagaan BIPP dengan cara dirangkap oleh Satuan Pelaksana BIMAS Kabupaten. Sementara di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat menetapkan

menjadi kelembagaan organik Daerah, sedangkan Satpel BIMAS merupakan kelembagaan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat yang memiliki tugas fungsi serta kedudukan yang berbeda. Kondisi seperti ini akan menimbulkan kesulitan pada saat BIPP dikukuhkan menjadi lembaga struktural organik Pemerin-



UPAYA MEMPERCEPAT BIPP

Ir. Bakri Suneth

SPH BIMAS
PROVINSI MALUKU

keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah ini. jadi tiada pilihan lain sesungguhnya BIPP itu sendiri dengan pola dan hubungan kerja yang lebih jelas.

Harus ada upaya mempercepat pembentukan BIPP ini, kita perlu mem-back up Asisten Daerah Tingkat II dalam pembentukan BIPP ini. karena itu Tim Pembina dan tingkat Provinsi selayaknya segera turun, tentunya dengan juklak yang lebih jelas dari Pusat. Sebab posisi penyuluh dalam masa transisi kalau dibiarkan mengambang, akan banyak kegiatan penyuluhan yang terbaiakan. Dan itu akan mengancam tercapai tidaknya

tah Daerah. Demikian pula dalam hal penunjukkan Pemimpin Proyek Inpres Dana Bantuan PPL, ada kabupaten yang menunjuk aparat dari salah satu Dinas lingkup pertanian, ada yang menetapkan aparat dari Satpel BIMAS, ada pula yang dari aparat Pemda.

Timbulnya perbedaan persepsi dan interpretasi yang menimbulkan keberbagaian sikap dan tindakan ini, pada dasarnya adanya perbedaan tingkat pemahaman terhadap isi dan esensi SKB itu sendiri atau mungkin pula adanya perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Sebaliknya, mungkin SKB itu sendiri yang belum secara jelas dan tegas memberikan jaminan kepastian pada kepentingan Dinas terkait. Karenanya kepada Pusat Penyuluhan Pertanian sekali lagi diharapkan dapat mengambil prakarsa untuk memproses perumusan solusi yang mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat. Sebaliknya, di dalam proses inipun pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat mengakomodasikan kepentingan SKB Mendagri - Mentan 1996 yang sangat diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian Nasional maupun Regional yang berorientasi ke masa depan.

Penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan bagi masyarakat pertanian, karenanya, sebagai sarana pendidikan masyarakat maka ia harus berorientasi ke masa depan, ke masa 25 atau 50 tahun mendatang tidak sekedar hanya memecahkan masalah dan kendala masa kini semata-mata.

Namun, kendatipun berorientasi ke masa depan, penyuluhan pertanianpun harus mampu ditata secara realistik, sesuai dengan realita yang dihadapi masyarakat pertanian masa kini, dan secara pragmatis mampu mencerminkan langkah-langkah konkrit menuju sasaran masa depan.

Penataan organisasi/kelembagaan Pemerintahan di Daerah adalah menjadi kewenangannya Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerimaan Aparatur Negara, sementara Menteri Pertanian berkewajiban melakukan pembinaan teknis, karenanya penyelesaian masalah pembentukan BIPP di Daerah tidak mungkin terselesaikan oleh Departemen Pertanian.

Legitimasi pembentukan BIPP harus didukung oleh terbitnya Petunjuk Pelaksanaan atau Surat Keputusan Mendagri dan Menpan. *"Sejak bulan Mei 1996 hal ini sudah diproses oleh Departemen Pertanian, dalam hal ini Pusat Penyuluhan, Biro Ortala, Biro Hukum dan Biro Kepegawaian bersama dengan unsur Departemen*

DR.Ir.H. Rochajat Harun, M.Ed.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian



Dalam Negeri. Berbagai pertemuan telah dilakukan untuk membahas rancangan Petunjuk Pelaksanaan ini, termasuk dengan aparat pertanian di Daerah yakni Ka Kanwil, Kepala Bidang Sumberdaya dan juga dengan para penyuluhnya" Demikian keterangan **Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian** mengenai upaya upaya yang tengah dilakukannya.

Ternyata langkah sudah mulai ditempuh, meski jalan itu tampak

Dinas Sub Sektor tidak lagi membawakan fungsi penyuluhan, karena akan beralih ke BIPP? Pertanyaan ini memerlukan jawaban yang segera agar berbagai prasangka dan praduga serta ketidak pastian ini segera diakhiri untuk berganti dengan gerakan dalam kesamaan dan kesatuan tindak.

Duplikasi atau tumpang tindih tugas fungsi di dalam suatu kelembagaan, bagaimanapun dan apapun dalihnya seringkali merupakan hal

selain mengemban idealisme bagi pendidikan masyarakat pertanian, penataan penyelenggaraan penyuluhan pertanian harus tetap realistik dan pragmatis.

masih jauh, sambil menunggu terbitnya aturan pelaksanaan pembentukan BIPP, sebenarnya di dalam SKB Mendagri-Mentan 1996 telah diatur Aturan Peralihannya, namun sebagaimana ditemukan oleh *ekstensia*, di Daerah masih dijumpai adanya kesan menunggu.

Tampaknya masih ada sesuatu yang mengganjal, masih diperlukan penjelasan yang lebih rinci, di antaranya mengenai tata hubungan kerja BIPP dengan Dinas Lembaga Otonom lingkup pertanian (*bukan-kah Dinas masih memiliki Seksi Penyuluhan ?*) dan dengan UPT Departemen Pertanian lainnya serta dengan Satuan Pelaksana BIMAS di Daerah, demikian pula mekanisme kerja dalam pelaksanaan program-program pembangunan pertanian. Tanpa adanya kejelasan mengenai pengaturan akan hal ini, maka selama itu pula pembentukan BIPP akan tetap menjadi sebuah misteri.

Benarkah dugaan yang dipergunjingkan oleh banyak orang bahwa dengan kehadiran BIPP, maka nanti

yang "*di-tabu-kan*" di dalam manajemen suatu organisasi. Selain kurang efektif dan tidak efisien, dalam prakteknya seringkali dijumpai berbagai kerancuan dan tidak jarang justru menjadi *sumber konflik*.

Barangkali hal ini pulalah yang menyebabkan munculnya tuduhan bahwa SKB '96. mempreteli tugas dan fungsi Dinas, atau bertentangan dengan Perda dan sebagainya itu. Berbagai sumber yang dicoba dihubungi *ekstensia* belum bersedia memberikan keterangan saat ini, "*Masalahnya masih sedang digodok !*", demikian jawabnya.

Dari sisi lain beberapa Kepala Dinas Sub Sektor Daerah Tk.II. mempertanyakan mengenai peranan Penyuluhan Pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian. "*Penanggungjawab program pembangunan pertanian di Daerah adalah Bupati, yang dilimpahkan kepada Dinas Dinas Sub Sektor, sementara para penyuluhnya harus dialihkan/diserahkan kepada BIPP, demikian pula dengan kelembaga-*

annya (maksudnya BPP), lantas bagaimana Dinas bisa melakukan pengendalian dan menjamin keberhasilannya?"

SKB Mendagri-Mentan 1996 sebenarnya telah mengatur pula mengenai Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian di Daerah maupun di Wilayah dan di Pusat, namun demikian Aparatur di Daerah menganggap bahwa hal ini masih memerlukan penjelasan atau petunjuk pelaksanaannya yang lebih terinci.

Dalam lima tahun terakhir ini penyuluhan pertanian lengkap dengan sarana, prasarana dan ketenagaannya seluruhnya praktis berada dalam kewenangan Dinas Sub Sektor, justru ternyata telah menyebabkan terjadinya stagnasi atau degradasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Namun demikian melihat kompleksitas dan intensitas masalahnya yang berakar sangat dalam hingga menyentuh

pada kepentingan eksistensi berbagai institusi, maka seyogyanya upaya pemecahannya pun tidak hanya berorientasi kepada proses mencari legitimasi kewenangan semata, tetapi juga dapat ditempuh melalui jalur pendekatan persuasif dan partisipatif.

Pencarian solusi secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur terkait dan berkepentingan di setiap tingkatan wilayah mungkin akan lebih mampu memproses pemecahan masalah secara paripurna dan tuntas. Bukankah bila semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan keputusan itu dilibatkan dan diikutsertakan pada proses pengambilan keputusannya akan dapat meningkatkan motivasi, kesadaran dan tanggungjawab mereka dalam pelaksanaannya? Ataukah peluang itu akan dibiarkan saja lewat dan ikut latah pada gunjingan yang merebak saat ini : ..ah teori...!

Kita sangat mengharapkan peran BIPP yang lebih spesifik terutama dalam penanganan berbagai aspek penyuluhan dalam kegiatan sebuah program, ataupun menciptakan kegiatan-kegiatan yang persuasif-edukatif sehingga penyelenggaraan program yang dibawa dinas akan lebih-lebih dimengerti dan diterapkan oleh petani-nelayan tepat sesuai dengan apa yang dianjurkan. Dengan peran spesifik

DIPERLUKAN PERAN SPESIFIK BIPP



Ir. M. Saleh Marasaberry

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
KABUPATEN MALUKU UTARA, MALUKU

itulah, kiranya nanti BIPP akan memberikan kontribusi menciptakan iklim yang lebih baik dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.

SATMINKAL (Satuan Administrasi Pangkal), "mBedol Desa" Penyuluh Pertanian

(Tantangan bagi eksistensi dan kredibilitas penyuluh pertanian di persada bumi penyuluhan pertanian yang masih saja gonjang-ganjing)

Sepertinya sudah menjadi suratan nasib para penyuluh, setiap ada perubahan kebijaksanaan maka yang langsung terkena dampaknya adalah figur yang bernama penyuluh pertanian, pada saat pemberlakuan SKB Mendagri-Mentan 1991, penyuluh yang tadinya berpangkalan di satu atap yaitu BIMAS berpencaran ditempatkan di Dinas-Dinas Sub Sektor.

Belum lagi para penyuluh ini menikmati perannya sebagai penyuluh dengan induk di Dinasnya masing-masing, muncullah SKB Mendagri-Mentan 1996 yang dalam salah satu pasalnya menyatukan kembali penyuluh di BIPP yang akan menjadi satuan administrasi pangkal (satminkal)-nya para penyuluh pertanian.

Sementara ini satminkal para penyuluh berada pada Dinas Sub Sektor Daerah, sesuai kedudukan dimana penyuluh itu berada. Kondisi seperti itu banyak dikeluhkan para penyuluh, mulai dari masalah penetapan Tim Penilai sampai kepada prosedur dan mekanisme pengusulan akreditasi dan kenaikan pangkatnya.

SKB Mendagri Mentan 1996 menetapkan bahwa satminkal penyuluh pertanian akan berada pada BIPP. Secara bertahap penyuluh pertanian yang selama lima tahun terakhir ini bertugas di Dinas

Dinas Sub Sektor Daerah harus dilimpahkan ke BIPP. Sekali lagi para penyuluh pertanian harus *hijrah*, ramai ramai "mbedol desa" pindah lagi ke BIPP, sebuah institusi baru yang ternyata masih dipermasalahkan kehadirannya di Daerah. Bermasalahkah ini ?

Sebagaimana ketentuan akan kelahiran BIPP, maka perubahan Satminkal para penyuluh pertanian ke BIPP inipun memperoleh tanggapan yang beragam pula, mulai dari sambutan positif dan antusias, yang skeptik dan pesimis sampai kepada respons yang negatif dan cenderung ke perlawanan pasif.

Sedikit berbeda dengan wujud ungkapan tanggapan terhadap masalah kelahiran BIPP yang sedikit lebih *terbuka*, maka ungkapan permasalahan seputar pengalihan satminkal penyuluh pertanian ini tampak atau terkesan agak sedikit tertutup.

Baik di kalangan para birokrat Daerah maupun di kalangan para penyuluh pertaniannya sendiri. Terkesan ada sedikit *ewuh pakewuh* untuk mengungkap masalah yang sebenarnya secara terbuka dan tuntas. *ekstensia* mencoba untuk mengorek dan menelusurinya guna mencari akar permasalahan yang sebenarnya, sebab tanpa menemukan akar permasalahan yang sebenarnya, tidak mustahil pengambilan solusinyapun tidak akan pernah tuntas.

Sebenarnya sudah bukan rahasia umum lagi, bahwa para penyuluh pertanian yang sekarang berada di Dinas Sub Sektor Daerah memang ada yang bertugas rangkap.

Di samping bertugas sebagai pejabat fungsional penyuluh, iapun merangkap tugas jabatan struktural lainnya, ada yang merangkap menjadi Kepala Cabang Dinas Kecamatan (KCD), ada yang bertugas menjadi Pengawas TPI dan Pemungut Retribusi, tugas keproyekan dan lain sebagainya.

Tidak jarang dari mereka yang karena kesibukan dalam tugas yang dirangkapnya, sudah tidak punya waktu lagi untuk melakukan tugas penyuluhannya. Kondisi seperti ini terjadi di hampir semua kabupaten

Kondisi faktual yang terjadi sekarang ini dengan menurunnya kinerja penyuluh pertanian, sebagian orang menuding diakibatkan karena hal-hal tersebut, sehingga tidak jelas lagi mana pekerjaan yang menunjukkan ciri mandiri seorang penyuluh atau pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh petugas struktural.

Tidak dapat disangkal lagi dengan kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996 dengan BIPP nya sekarang ini membuat Dinas-Dinas Sub Sektor terhenyak. Tenaga penyuluh yang semula menjadi tulang punggung

BIPP sebagai satminkal penyuluh bukan untuk bernostalgia, namun merupakan babak baru penyuluhan pertanian yang semakin menuntut kredibilitas dan profesionalisme penyuluhnya.

dan di semua Dinas lingkup pertanian, terutama pada Dinas yang masih "*kecil*" dan dengan jumlah personil yang sangat minim.

Ilustrasi yang digambarkan diatas menunjukkan betapa rentannya peran penyuluh pertanian, entah saking fleksibelnya peran sebagai penyuluh pertanian ini sehingga berbagai tugas bisa dibebankan pada mereka, dan hebatnya pula tugas tersebut bisa dilaksanakan oleh penyuluh.

Melihat dari sisi kepentingan Dinas, kehadiran penyuluh pertanian dengan tambahan muatan pekerjaan struktural memang sangat membantu tetapi bila dilihat dari kepentingan pengembangan profesi penyuluh pertanian hal tersebut justru menimbulkan efek menurunnya kualitas kemandirian serta kehandalan penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.

Dinas dalam pelaksanaan program dan proyek-proyeknya, sekarang dengan kehadiran BIPP, tenaga-tenaga tersebut seolah akan direnggut dan secara otomatis hilangnya sudah kewenangan Dinas untuk mengatur serta menugaskan penyuluh.

Kekhawatiran semacam ini cukup beralasan, terutama apabila persepsi dalam menterjemahkan pengertian satminkal serta kelembagaan BIPP seakan seperti menara gading yang akan dengan angkuhnya berdiri sendiri dan tidak peduli pada kepentingan yang lain.

Padahal bila disimak lebih dalam lagi, kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996 justru membawa muatan filosofi dan idiil yang cukup pekat dalam menempatkan peranan penyuluh pertanian pada posisi strategis untuk dapat diakses oleh berbagai Dinas bagi penugasan

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT.210/7/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.
2. Informasi Pertanian adalah suatu data/bahan yang diperlukan Penyuluh Pertanian, petani-nelayan dan masyarakat pertanian.
3. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada Satuan Organisasi lingkup pertanian.
4. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BIPP adalah Unit Kerja penyuluhan pertanian yang merupakan unit kerja organik yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
5. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah instalasi BIPP yang mempunyai tugas menyusun program penyuluhan, membimbing penyusunan rencana kerja penyuluh, dan melakukan kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
6. Program Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian adalah suatu rencana kegiatan pendayagunaan segala sumberdaya penyuluhan pertanian di berbagai tingkat berdasarkan prinsip kerjasama yang serasi, selaras dan terpadu antara masyarakat petani-nelayan dengan pemerintah dan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, dalam rangka mewujudkan kondisi yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan program pembangunan pertanian.
7. Prorama Penyuluhan Pertanian adalah rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi petani-nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program

pembangunan pertanian, yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai, masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun.

8. Rencana Kerja Penyuluh Pertanian adalah jadwal kegiatan yang disusun oleh para Penyuluh Pertanian berdasarkan program penyuluhan pertanian setempat, yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan petani-nelayan.

BAB II

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 2

- (1) Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Nasional disusun oleh Pusat Penyuluhan Pertanian, sesuai dengan program pembangunan Sektor Pertanian dan selaras dengan Program Pembangunan Pertanian Wilayah.
- (2) Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Propinsi Daerah Tingkat I disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian, dengan mengacu pada Program Pembangunan Wilayah dan dengan memperhatikan Petunjuk Teknis Menteri Pertanian.
- (3) Program penyelenggaraan penyuluhan pertanian Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II disusun oleh Pemerintah Daerah Tingkat II yang dikoordinasikan oleh Kepala BIPP, dengan mengacu pada Program Pembangunan Pertanian Daerah Tingkat II dan Petunjuk Teknis Menteri Pertanian.

BAB III

PROGRAMA PENYULUHAN PERTANIAN

Pasal 3

- (1) Unit kerja lingkup pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian di setiap tingkat wilayah administratif menyusun program penyuluhan pertanian terpadu, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar bagi para Penyuluh Pertanian untuk menyusun rencana kerjanya.
- (2) Penyusunan program penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh kelompok Penyuluh Pertanian yang berada pada unit kerja yang bersangkutan, dengan mengikutsertakan secara aktif kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
- (3) Berdasarkan program penyuluhan pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), setiap Penyuluh Pertanian yang ada di unit kerja bersangkutan wajib membuat rencana kerja.

Pasal 4

- (1) Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Nasional disusun oleh Kelompok Penyuluh Pertanian yang berada di Pusat Penyuluhan Pertanian bersama dengan kelompok KTNA tingkat Nasional, berdasarkan program pembangunan pertanian nasional.
- (2) Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Propinsi Daerah Tingkat I disusun oleh Kelompok Penyuluh Pertanian yang berada di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I bersama Kelompok KTNA tingkat Propinsi Dati I, berdasarkan program pembangunan pertanian wilayah.
- (3) Programa Penyuluh Pertanian tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II disusun oleh Kelompok Penyuluh Pertanian yang berada di BIPP bersama kelompok KTNA tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II, berdasarkan program pembangunan pertanian tingkat Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
- (4) Programa Penyuluhan Pertanian tingkat Wilayah Kerja BPP disusun oleh Kelompok Penyuluh Pertanian yang berada di BPP bersama kelompok KTNA tingkat Kecamatan, berdasarkan rencana usaha petani-nelayan, potensi wilayah dan program pembangunan pertanian di wilayah kerjanya.

**BAB IV
PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN****Pasal 5**

- (1) Menteri Pertanian sesuai dengan kewenangannya merupakan penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sesuai dengan kewenangannya merupakan penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I lingkup Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II, sesuai dengan kewenangannya merupakan penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala BIPP yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat II lingkup Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai dayaguna dan hasil-guna secara optimal dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perlu dilaksanakan koordinasi antar instansi yang terkait.
- (2) Menteri Pertanian melaksanakan koordinasi penyuluhan pertanian di tingkat Pusat, yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

- (3) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melaksanakan koordinasi penyuluhan pertanian di Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (4) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap Dinas Daerah Tingkat I dan Tingkat II lingkup Pertanian serta BIPP, dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah.

BAB V KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BIPP

Pasal 7

- (1) Pada setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dibentuk I (satu) BIPP, yang mempunyai wilayah kerja satu wilayah administrasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dipilih dari salah satu BPP yang telah ada, dan pembentukannya ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) BIPP merupakan unit kerja organik penyuluhan pertanian yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai pengalaman di bidang penyuluhan pertanian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II

Pasal 8

- (1) BIPP mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan pertanian di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BIPP menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program penyuluhan pertanian;
 - b. bimbingan penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian;
 - c. penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
 - d. pembinaan pengelolaan BPP;
 - e. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
 - f. pemantauan dan evaluasi;
 - g. sentra komunikasi pembangunan pertanian di Kabupaten/Kotamadya;
 - h. penyelenggaraan pelatihan/kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan;
 - i. melakukan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan;
 - j. bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan;

- k. penyelenggaraan percontohan;
- l. pengelolaan perpustakaan;
- m. melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian;
- n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BIPP menggunakan BPP sebagai instalasi/sarana kegiatan penyuluhan pertanian di Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Di setiap Kecamatan dibentuk 1 (satu) BPP atau lebih yang mempunyai wilayah kerja satu wilayah administrasi Kecamatan atau kelipatan Desa dalam satu wilayah administrasi Kecamatan, yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (2) BPP diarahkan untuk dikelola oleh kelompok tani-nelayan yang dibimbing oleh seorang Penyuluh Pertanian senior, yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala BIPP.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BIPP dan BPP dilengkapi dengan sarana yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Bagi BIPP dan BPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang sarannya belum lengkap, maka Pemerintah Daerah secara bertahap melengkapi sarana tersebut.
- (3) Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian berkewajiban untuk melakukan pembinaan teknis terhadap BIPP dan BPP.

Pasal 12

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, tidak dibenarkan mengalihkan tugas dan fungsi BIPP dan BPP.

BAB VI TENAGA PENYULUH PERTANIAN

Pasal 13

Penyuluh Pertanian ditempatkan di Unit Kerja Pertanian Pusat atau Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian.

Pasal 14

- (1) Penyuluh Pertanian yang ditempatkan di unit kerja Pertanian Pusat yang berlokasi di Daerah, satuan administrasi pangkalnya berada pada Kantor Wilayah Departemen Pertanian.

- (2) Penempatan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian.
- (3) Status Penyuluh Pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Departemen Pertanian.

Pasal 15

- (1) Penyuluh Pertanian yang ditempatkan di unit kerja pertanian Daerah Tingkat II, satuan administrasi pangkalnya berada pada BIPP.
- (2) Penempatan Penyuluh Pertanian di Daerah Tingkat II ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sedangkan penempatan Penyuluh Pertanian di BIPP dan BPP ditetapkan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- (3) Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan.
- (4) Penyuluh Pertanian yang sebelum ditetapkan Keputusan Bersama ini jenis kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil Pusat Dipekerjakan dan ditempatkan di Unit Kerja Pertanian Daerah, maka dengan berlakunya Keputusan Bersama ini secara bertahap jenis kepegawaiannya dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat Diperbantukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Penyuluh Pertanian yang sudah ada pada Dinas Tingkat II lingkup Pertanian, dengan berlakunya Keputusan Bersama ini dialihkan penempatannya pada BIPP.
- (2) Kepala BIPP mengatur pelaksanaan tugas para Penyuluh Pertanian di BIPP untuk melakukan kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Formasi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil calon Penyuluh Pertanian, berada pada Departemen Pertanian.
- (2) Pengisian formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Daerah yang memenuhi persyaratan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Biaya kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Pusat, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pertanian.

- (2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan penyuluhan pertanian di Daerah yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dibebankan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I atau Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (3) Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian secara bersama mengatur pembiayaan BIPP, BPP dan Penyuluh Pertanian dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Daerah.

BAB VIII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara BIPP dengan Dinas-Dinas Daerah Tingkat II lingkup Pertanian adalah hubungan koordinatif, sedangkan pembinaan taktis operasional terhadap BIPP dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang sehari-hari dilakukan oleh Asisten II Sekwilda Tingkat II.
- (2) Mekanisme hubungan kerja antara BIPP dengan Dinas Daerah Tingkat II lingkup Pertanian, lebih lanjut diatur dengan Keputusan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya BIPP sebagai Unit Kerja Struktural di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Susunan Organisasi BIPP terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya.
 - b. Kepala BIPP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
 - c. Satuan administrasi pangkal Penyuluh Pertanian yang ditempatkan di unit kerja pertanian Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), berada pada Pemerintah Daerah Tingkat II.
- (2) Selama BIPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum dibentuk, penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh BPP sesuai arahan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini sepanjang yang berkaitan dengan aspek pembinaan umum akan diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri, dan yang berkaitan dengan aspek pembinaan teknis akan diatur tersendiri oleh Menteri Pertanian.

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Keputusan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian

Nomor 65 Tahun 1991
539/Kpts/LP.120/7/1991

tanggal 22 Juli 1991 dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 10 April 1996

MENTERI PERTANIAN,

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

ttd.

SJARIFUDIN BAHARSJAH

MOH. YOGIE S.M.

Mendinamisasikan Partisipasi Kelompok Tani-Nelayan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Oleh : *Aida Vitayala Sjalri Hubeis*

Strategi pembangunan pertanian PJPT II dan terutama REPELITA VI diarahkan pada upaya mewujudkan pertanian yang tangguh, maju dan efisien yang dicirikan oleh kemampuannya dalam mensejahterakan petani, pekebun, peternakan dan nelayan (Deptan RI, 1995). Tujuan tersebut dicapai melalui empat usaha pokok pembangunan pertanian yaitu diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi yang diikuti oleh *prinsip demokrasi pertanian*.

Penerapan demokrasi pertanian dalam buku Repelita VI Pertanian (Deptan RI, 1995, hal 119) dilakukan melalui cara berikut;

- 1) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia petani, peternak dan nelayan sehingga mereka mampu berfikir kritis dalam membuat keputusan yang tepat bagi usaha pertaniannya.
- 2) Peningkatan desentralisasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat.
- 3) Pengembangan produksi dengan memperhatikan mekanisme pasar, optimalisasi pemanfaatan sum-

berdaya pertanian wilayah dan pengembangan keseluruhan mata rantai agribisnis.

- 4) Pengembangan mitra usaha antar berbagai pelaku ekonomi dengan menerapkan keserasian dan keseimbangan pembagian resiko dan keuntungan dalam sistem kekeluargaan antara koperasi, BUMN dan swasta.
- 5) Pembinaan perundang-undangan di bidang pertanian sebagai pelaksanaan dari sistem hukum nasional.
- 6) Pembinaan kelembagaan pertanian dan pedesaan yang dapat berfungsi dalam memobilisasi dan menyalurkan dana, jasa dan produk masyarakat pedesaan yang kehadirannya dijamin dengan peraturan bahwa lembaga itu dikelola dan dimiliki oleh masyarakat pedesaan.

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian

Kelembagaan pertanian dan pedesaan terdiri atas kelembagaan aparatur, kelembagaan tani dan kelembagaan sosial ekonomi pedesaan. Pembinaan terhadap semua kelembagaan ini ditujukan pada

*DR. Aida Vitayala
Sjalri Hubeis*

Ketua Program Studi
Penyuluhan dan
Komunikasi
Pembangunan
Pascasarjana IPB

upaya peningkatan peranserta, efisiensi dan produktivitas masyarakat pertanian. Dalam hal ini peran dan fungsi penyuluhan merupakan ***ujung tombak keberhasilan pembangunan pertanian***.

Menurut SKB Mendagri dan Mentan Nomor 54 (10 April 1996), penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai ***"sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peransertanya dalam pembangunan pertanian"***. Konsep ini mensyaratkan ***kemandirian petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian*** sebagai unsur penentu kualitas partisipasinya dalam pembangunan pertanian.

Kemandirian dan kualitas masyarakat pertanian dapat ditumbuhkembangkan melalui kegiatan ***penyuluhan pertanian simultan*** yaitu alih teknologi inovasi pertanian yang disejajari dengan pengembangan sumberdaya manusia (*human capital development*), yaitu petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian lainnya secara keseluruhan. Kemandirian adalah perwujudan kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi diri sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dicirikan oleh kemampuan dan kebebasan menentukan pilihan yang terbaik (Hubeis, AVS, 1991). Inti kemandirian ialah memungkinkan seseorang untuk meningkatkan ***kualitas diri*** mencakup aspek

kualitas hidup, kerja, karya dan pikir. Pemenuhan kualitas hidup melalui kebutuhan dasar (*basic need*) selanjutnya akan mempengaruhi kemampuan seseorang dalam meningkatkan kualitas kerja, karya dan pikir.

Pengamatan empiris menunjukkan bahwa desakan ekonomi pada PJPT I dan kebijakan swasembada pangan mengakibatkan kegiatan penyuluhan pertanian terstimuli untuk menjustifikasi kegiatannya pada pencapaian ***kriteria ekonomi instans*** (bersifat segera) yang menstimuli tumbuhnya strategi alih-teknologi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dalam PJPT II dimana kualitas manusia merupakan target utama pembangunan maka jelas kebijakan penyuluhan pertanian seperti ini akan sulit diarahkan pada tujuan ***broad based agricultural development*** dan penumbuhan masyarakat sebagai ***agent of change***.

Untuk mencapai tujuan jangka panjang pembangunan pertanian berlanjutan (*sustainable agricultural development*) maka kegiatan penyuluhan pertanian yang cenderung diarahkan pada penggunaan strategi penyuluhan atas dasar alih teknologi (dari pemerintah ke petani) perlu dibarengi dengan pengembangan sumberdaya manusia (*human capital development*). Strategi ini akan mendasari pengembangan materi penyuluhan dengan orientasi pada pengetahuan yang dimiliki petani (*farmers knowledge*) dan kebutuhan yang mereka rasakan (*felt-need*). Dengan demikian ***orientasi alih-teknologi dapat bersifat bolak balik***, dari petani ke pemerintah atau dari pemerintah ke petani tetapi telah

dikemas ulang mengikuti karakteristik khalayak sasaran pengguna inovasi pembangunan pertanian.

Pernyataan di atas jelas akan mudah dibantah oleh berbagai pihak dengan acuan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia, sebelum ada SKB Mendagri dan Mentan Tahun 1991 yang kemudian disempurnakan dalam SKB Tahun 1996; telah dilakukan melalui pendekatan LAKU (Latihan dan Kunjungan). Dalam Pendekatan ini telah dilakukan justifikasi terhadap *farmers' knowledge* dan *farmers' felt need*. Namun, melihat pada asumsi yang mendasari pelaksanaannya di lapangan maka sebenarnya inti kegiatan pendekatan LAKU lebih diarahkan pada hal berikut :

- 1) Mendisiplinkan penyuluh dalam bekerja melalui kunjungan ke petani yang terjadual dan teratur.
- 2) Meningkatkan kualitas penyuluh yang kurang mumpuni yang diimbangi melalui latihan terjadual di BPP dan konsultasi problema yang dihadapi penyuluh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan terjadual dua mingguan antara penyuluh lapangan dan penyuluh spesialis di BPP atau di tingkat kabupaten.
- 3) Menjembatani keterkaitan hasil penelitian dengan kegiatan penyuluhan pertanian di lapangan. Harapan ini diatur melalui kunjungan rutin terjadwal dari penyuluh ke tiap kelompok tani binaan. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Indeco (1991) menunjukkan bahwa keterkaitan kegiatan penyuluhan sebagai implementasi hasil penelitian dari Litbangtan atau

lembaga penelitian lain belum berjalan karena struktur mekanismenya belum terpahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Akibatnya, kebanyakan penyuluh lebih banyak menstansfer berbagai paket penyuluhan yang telah dikemas secara nasional sebagai kegiatan utamanya. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan sebagian besar mereka untuk menjustifikasi selain ketidakberanian memodifikasi petunjuk pelaksanaan dari atas.

Peran penyuluh sebagai pelaksana kegiatan penyuluhan pertanian di tingkat akar bawah (*grass-root level*), walaupun dengan kelemahan di sana sini, tidak diragukan lagi kemanfaatannya dan keunggulannya dalam menentukan keberhasilan pertanian pada era PJP I. Akan tetapi sejak adanya transisi alih penyuluh dan urusan penyuluhan pertanian dari pusat ke daerah sebagai ujud desentralisasi dan otonomisasi mulai terdengar *nada-sumbang* yang kurang menggembirakan perihal urusan pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Penyebab hal ini diantaranya ialah :

- 1) Pemda Tingkat II memiliki kemampuan yang berbeda dalam merealisasikan desentralisasi urusan penyuluhan pertanian, terutama dalam hal alokasi dana. Akibatnya, sistem kerja LAKU mengalami perubahan sesuai dengan ketersediaan dana di tiap daerah.
- 2) Kerancuan operasional penyuluh pertanian di lapangan menimbulkan kekurang-serasian antar penyuluh sebagai akibat telah terbaginya kegiatan penyuluh

pada dinas-dinas sub sektor dan secara struktural penyuluh sudah dialihkan ke Pemda. Dualisme ini menimbulkan kebingungan karena mekanismenya belum berjalan tuntas.

- 3) Kesekretariatan bersama sebagai wadah urusan penyuluhan pertanian di lapangan yang belum mantap mengakibatkan kebingungan berkiblat pada penyuluh yang berdampak pada kebingungan petani untuk mengkonsul penyuluh.
- 4) Tampilan kinerja penyuluh pertanian sangat rendah yaitu hanya 66% penyuluh yang masih mematuhi patokan jam kerja per minggu. Rataan jam kerja per minggu per penyuluh ialah sebesar 36,4 jam dan mengunjungi sebanyak 2,4 kelompok tani per minggu (Jibatani Karsa, 1994).

Secara keseluruhan, dampak penyerahan urusan penyuluhan pertanian kepada daerah menimbulkan hal-hal berikut (Warta Pertanian No.156. Th XIII, Mei 1996, Hal 26-28):

- 1) Manajemen penyelenggaraan penyuluhan terbagi ke dalam empat dinas subsektoral (Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan).
- 2) Kelembagaan penyuluhan seperti BPP harus terbagi habis juga pada empat dinas subsektoral tersebut.
- 3) Perbedaan kemampuan dan pemilikan sumberdaya pada tiap dinas otonom menimbulkan bias yang melemahkan kesatuan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah.

- 4) Alokasi tenaga penyuluh pertanian dan administrasi kepegawaian dikelola terpisah oleh tiap dinas subsektoral.

Mengacu pada isu pokok ini maka *revitalisasi penyuluhan pertanian* dianggap sebagai suatu strategi untuk mensolusi permasalahan yang mungkin akan timbul dengan adanya perubahan pelaksanaan urusan penyuluhan pertanian. Tujuan yang ingin dicapai revitalisasi penyuluhan pertanian yaitu menumbuhkembangkan kemampuan aparat daerah dalam memenej urusan penyuluhan pertanian yang kini sudah diserahkan ke pihak Pemda setempat.

Upaya revitalisasi telah tercantum sebagian dalam SKB Mendagri-Mentan Tahun 1996 yang merupakan penyempurnaan SKB Mendagri-Mentan Tahun 1991. Inti dari SKB 1996 adalah pada kebijakan pengaturan kelembagaan, termasuk tatahubungan kerja penyuluhan dan pendanaan.

Pengaturan mekanisme dan manajemen penyuluhan yaitu (1) Kelompok tani-nelayan, (2) penyuluh pertanian, (3) materi penyuluhan, (4) metode dan teknik penyuluhan, (5) mekanisme serta tatakerja penyuluhan

Kebijakan Penyelenggaraan Penyuluhan

Berdasarkan SKB Mendagri dan Mentan Tahun 1996, kebijakan penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara nasional merupakan tanggungjawab.

Menteri pertanian. Dalam pelaksanaannya Mentan dibantu oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian.

- 2) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Tingkat Propinsi Daerah Tingkat I merupakan tanggungjawab Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Dalam pelaksanaannya Bupati dibantu oleh Kepala Dinas Daerah Tingkat I lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 3) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten atau Kotamadya di Daerah Tingkat II merupakan tanggungjawab Bupati atau Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II. Dalam pelaksanaannya Bupati atau Walikota dibantu oleh Kepala BIPP (Balai Informasi Penyuluhan Pertanian) yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Daerah Tingkat II lingkup pertanian sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 4) Bimbingan teknis penyuluhan pertanian di daerah dilakukan oleh Kakanwil untuk Dati I dan salah satu Kadinis DT II lingkup pertanian yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Mekanisme ini merupakan perubahan mendasar dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian di Indonesia.

Perubahan sistem penyuluhan ini diikuti oleh perubahan peran BPP yang semula berfungsi sebagai sentral kegiatan penyuluhan atau satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian menjadi penunjang kegiatan di bidang penyuluhan pertanian. Asset BPP yang semula dikelola oleh pemerintah pusat

diserahkan ke pemerintah daerah, kecuali penyuluh berpendidikan sarjana pertanian. Dampak lebih lanjut adalah WKPP (Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian) yang semula ditetapkan atas dasar hamparan area wilkel atau jumlah kelompok berubah mengikuti dinamika perkembangan pertanian dalam pengelolaan Dinas lingkup pertanian yang dipilih atas dasar komoditas dominan di wilayah tersebut.

Kebijakan ini, walaupun tidak dicantumkan dalam SKB Mendagri-Mentan Tahun 1991 atau dalam penyempurnaannya pada SKB Tahun 1996, menunjukkan adanya kecenderungan pola penyuluhan monovalen atau *pendekatan komoditi spesifik* (*The commodity specialized approach*). Masalahnya apakah benar demikian?

Kegiatan penyuluhan dengan pendekatan komoditas (lihat, FAO, 1988) bertujuan untuk meningkatkan produktivitas komoditas tertentu. Pelaksanaannya lebih mudah dan langsung, walaupun mungkin akan menimbulkan konflik tujuan dan kompetisi di masyarakat pertanian atau bahkan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional.

Perencanaan program pertanian subsektoral (cenderung menjadi desentralisasi?) bersifat instruktif karena ukuran keberhasilannya dilihat dari aspek produksi total komoditas disesuaikan dengan prediksi produksi yang hanya dapat dicapai jika semua instruksi diikuti oleh petani. Masalahnya ialah sudah siapkah aparat penyuluhan dinas subsektoral di lingkup pertanian untuk meresponi perubahan ini

dalam kaitannya dengan operasionalisasi kegiatan penyuluhan di lapangan dan sarana yang harus dipersiapkan?

Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak mudah, karena memerlukan ubahan sikap mental dari aparat penyuluh dan juga aparat fungsional pertanian, termasuk pemerintah daerah sebagai penanggungjawab kegiatan urusan penyuluhan pertanian. Selain itu, tuntutan manajemen penyuluhan pertanian yang harus dipenuhi oleh pendekatan komoditas antara lain ialah :

- 1) **Informasi pasar yang kontinyu:** Keperluan perihal ketersediaan informasi pasar yang kontinyu mensyaratkan rekomendasi teknik bertani mencakup rasio harga komoditas dan input faktor yang dapat memberikan keuntungan finansial untuk petani. Rekomendasi ini harus selalu dimodifikasi mengikuti perubahan harga pasar. Berarti perlu ada penelitian dan kajian yang berkesinambungan serta dikomunikasikan secara kontinyu pula kepada petani.
 - 2) **Teknik penyuluhan:** Rekomendasi perihal teknik pertanian dapat dilakukan melalui cara didemonstrasikan di lahan petani dan dengan dilakukan oleh petani. Cara ini telah umum dilakukan dalam kegiatan penyuluhan pertanian di era PJPT I dalam bentuk Demplot, Dem-cara, dan Dem-hasil.
 - 3) **Distribusi:** Input produksi yang direkomendasikan harus tersedia setempat (*locally available*), pada waktu yang tepat, dalam jumlah dan mutu yang tepat.
 - 4) **Kredit:** Rekomendasi input pertanian harus diimbangi dengan pemberian kredit yang memungkinkan petani mengadopsinya secara keseluruhan.
 - 5) Rasio antar harga dasar input pertanian dan harga komoditas unggulan harus dirumuskan.
- Jika satu dari lima hal ini tidak ada atau tidak dapat terpenuhi dengan tuntas maka esensi keberhasilan kelangsungan perubahan teknologi pertanian akan terputus. Pertanyaan yang dapat diajukan agar dapat mengantisipasi tuntutan ini ialah :
- 1) Apakah para penyuluh yang sekarang ini berpangkal di lingkup sub-sektoral Deptan telah siap atau disiapkan untuk menangani hal ini?
 - 2) Bagaimanakah kesiapan pemerintah daerah dalam mengkoordinasikannya? Sebagai contoh, sudahkah dipersiapkan penyuluh-penyuluh yang berspesialisasi dalam berbagai komoditi unggulan spesifik lokal, seperti kelapa sawit, nanas, karet, hortikultura, seaweed, dan lainnya.
 - 3) Bagaimanakah penyebaran spesialisasi keahlian penyuluh pertanian yang kabarnya sudah mencapai jumlah 30 ribuan lebih? Apakah terdistribusi merata ke tiap subsektoral departemen pertanian?
 - 4) Apakah penyuluh sudah dilengkapi sarana yang memadai, misalnya transportasi dan alat bantu penyuluhan yang merupakan persyaratan penyuluh berspesialisasi komoditi tertentu? (Lihat FAO, 1988).
 - 5) Bagaimana kaitan persoalan di atas dengan otonomisasi penyuluhan pertanian?

Khalayak Sasaran Penyuluhan

Secara empiris telah diketahui bahwa kebutuhan penyediaan pangan dan faktor ekonomi acapkali mensemangati kegiatan penyuluhan untuk lebih memusatkan perhatian pada sektor pertanian komersial. Namun, mengingat peletakan dasar pada PJPT II adalah pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia maka orientasi pada *growth with equity* menjadi perlu untuk lebih diprioritaskan dalam mengidentifikasi khalayak sasaran. Dengan demikian, semua petani termasuk petani gurem dan miskin harus diperhatikan untuk *menjadi dan dijadikan* khalayak sasaran penyuluhan pertanian.

Kebijakan REPELITA VI Deptan telah menempatkan perhatian khusus pada pelibatan pemuda dan wanita dalam percepatan pembangunan pertanian. Khusus untuk kelompok wanita, perhatian terhadap wanita petani janda perlu diberi prioritas. Berdasarkan pengamatan penulis di berbagai perdesaan ternyata kelompok janda relatif agak terabaikan (*abandoned target*) tidak hanya oleh penyuluhan pertanian tetapi juga oleh berbagai program pembangunan lainnya. Menjadikan mereka sebagai khalayak sasaran khusus akan membantu percepatan pembangunan perdesaan dan khususnya pembangunan pertanian. Menurut perkiraan kasar, jumlah wanita bersatus janda di daerah perdesaan kini telah mencapai angka 16%.

Penyuluh pertanian yang harus melayani sekitar 25 juta petani dan

keluarganya jelas tidak mungkin dilakukan melalui penggunaan metode pendekatan individu. Metode kelompok melalui pendekatan individu. Metode kelompok melalui pendekatan LAKU sebagai pendekatan alternatif telah dipilih oleh pemerintah dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian kepada petani.

Mengingat keragaman masyarakat pertanian di Indonesia sebagai khalayak sasaran program pembangunan pertanian maka pemahaman tentang karakteristik mereka sebagai *end users* merupakan suatu keharusan. Pemahaman ini akan membantu penyuluh dalam menentukan materi, metoda dan teknik penyuluhan yang akan digunakan serta ketepatan saat penyampaiannya. Karena itu, pendekatannya pun harus spesifik bagi tiap-tiap perbedaan tersebut (Hubeis, Aida VS, 1992), selain bersifat spesifik lokal walaupun pemikirannya dapat saja bersifat global (*think globally, but act locally*).

Pemahaman tentang karakteristik petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian selaku khalayak sasaran akan membantu penentuan alternatif pendekatan penyuluhan (*alternataive approaches to extension*) berdasarkan program yang akan dilakukan. Pengelompokan petani yang dilakukan oleh Departemen Pertanian dalam kegiatan penyuluhan pertanian mencakup khalayak sasaran bapak tani, ibu tani (wanita tani atau tani wanita), dan pemuda/tarunatani plus tambahan kelompok transmigrasi dan petani miskin (melalui proyek khusus P4K) merupakan faktor essensial dalam

mendekati masyarakat petani yang heterogen dalam aspek ekonomi, sosial, budaya sebagai upaya mempertahankan pertanian berkelanjutan dan dinamika petani.

Kelompoktani versus Pengelompokan Petani

Pemanfaatan kelompoktani dan nelayan pada era PJPT (Pembangunan Jangka Panjang Tahap I) sebagai sarana pembinaan khalayak sasaran pembangunan pertanian melalui kegiatan penyuluhan pertanian telah terbukti menunjukkan keberhasilan yang mempesona dengan tercapainya swasembada beras (pangan) pada tahun 1984. Sarana lain seperti ketersediaan saprodi, penggunaan teknologi pra panen dan pasca panen jelas memiliki kontribusi positif terhadap keberhasilan tersebut. Akan tetapi dari sudut transformasi inovasi pertanian, pemanfaatan *khalayak sasaran strategis* seperti kelompoktani merupakan kunci akhir penentu keberhasilan program pembangunan pertanian.

Selama ini rekayasa sumberdaya manusia acap dianggap kurang strategis oleh mereka yang berpendapat bahwa rekayasa teknologi lebih perlu diutamakan dalam pencapaian tujuan transformasi inovasi pembangunan. Padahal, kajian empiris menunjukkan bahwa hasil rekayasa teknologi secanggih apa pun tidak akan ada manfaatnya jika *tidak dapat* memotivasi orang untuk menggunakan teknologi tersebut. Dalam hal ini, *media tepat* untuk melakukan alih informasi akan sangat menentukan keberhasilan pendifusian teknologi tersebut di

masyarakat. Kekeliruan berikutnya dilanjutkan pada kurangnya *intensitas pembinaan, pengaturan dan perangkulan* kepada khalayak sasaran secara sistematis, sinambung dan holistik. Asumsi yang digunakan oleh pihak **pembuat kebijakan** sangat sederhana yaitu sudah sepatutnya petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian mengikuti anjuran pemerintah untuk mengadopsi teknologi baru di bidang pertanian karena akan meningkatkan produktivitas dan selanjutnya membantu stabilitas harga dan distribusi produk pertanian.

Akibat lebih lanjut, pemahaman nilai-nilai bertani dan berproduksi yang dianut petani menjadi dinomorduakan. Padahal untuk mengubah nilai-nilai yang tidak mendukung percepat inovasi pembangunan pertanian jelas dibutuhkan pemahaman terhadap nilai lama sebagai langkah awal *mensosialisasikan nilai baru* yang hanya akan dapat terujud melalui rekayasa sumberdaya manusia pertanian sebagai pelaku langsung dan aktif di tingkat lapangan. Rekayasa petani dalam konteks dinamika kelompoktani memerlukan strategi tersendiri dan kemauan serta kepedulian berbagai pihak untuk mengantisipasinya dalam bentuk kesepakatan humanisasi dan demokratisasi.

Kelompok atau pengelompokan petani pada awalnya dilakukan melalui pendekatan domisili (tempat tinggal) yang kemudian dimodifikasi mengikuti hamparan lahan pertanian. Dua cara ini memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing.

1. Pengelompokkan petani menurut hamparan lahan pertanian memudahkan mekanisme penyaluran saprodi. Kelemahannya ialah pada pendinamisasian kelompok-tani merupakan sesuatu hal yang bersifat krusial dan acap mengganggu kelancaran sarana produksi. Keadaan ini mungkin terjadi karena petani yang dikelompokkan petani menurut hamparan lahan pertanian tidak selalu saling kenal secara personal dan terpecah dalam kelompok kecil-kecil ini digabung menjadi satu kelompok hamparan, terutama terkait dengan pendistribusian air irigasi, maka persoalan yang muncul ialah siapa yang menjadi pemimpin dari pemimpin-pemimpin per kelompok kecil. Kekeliruan atau ketidaktepatan pilihan akan mengakibatkan dinamika kelompok secara keseluruhan menjadi terganggu. Apabila jika penentuan pemimpin diintervensi oleh *campur tangan* dari kekuasaan atas (pemerintah), baik karena alasan politis maupun alasan lainnya. Demokratisasi penentuan pemimpin kelompok-tani menjadi kunci utama perwujudan fleksibilitas dinamika kelompok. Pemimpin yang dipanut dan dituruti akan mampu memotivasi anggota kelompok untuk maju menyesuaikan diri dengan tuntutan pembangunan dan keinginan pemerintah sesuai dengan kebijakan pembangunan pertanian.
2. Pengelompokkan petani menurut domisili memiliki keunggulan dalam hal keberadaan solidaritas dan solidaritas diantara anggota kelompok. Kelemahannya ialah

mereka tidak selalu memiliki lahan pertanian pada hamparan yang sama. Padahal pembinaan kelompok-tani dewasa ini cenderung diarahkan pada kesamaan hamparan lahan pertanian atau menurut wilayah pertanian.

Dua cara pengelompokan petani idealnya adalah digabungkan atau dikombinasikan dengan memperhatikan aspek kesamaan sedomisili dan sekaligus sehamparan lahan pertanian. Cara ini jelas tidak mudah diaplikasikan karena misalnya, akan terbentur pada minimal jumlah petani yang perlu dikelompokkan untuk mencapai batasan definitif satu hamparan lahan pertanian.

Secara historis dan empiris dua cara pengelompokkan petani menurut domisili dan hamparan lahan pertanian telah digunakan pada era PJP I. Kesinambungannya pada era PJP II terletak pada upaya merevitalisasi dinamika kelompok-tani per spesifik pusat kesamaan perhatian, diantaranya ialah :

1. Kesamaan unit produksi
2. Kesamaan jenis komoditas hasil pertanian unggulan atau komoditas spesifik lokasi yang diusahakan.

Matrik kesamaan pusat perhatian dikaitkan dengan cara pengelompokan petani sedomisili atau sehamparan lahan pertanian akan menghasilkan alternatif kombinasi pembinaan kelompok-tani yang lebih berdayaguna dan mungkin juga menjadi lebih manusiawi. Jika cara ini akan ditempuh maka jelas akan diperlukan mekanisme penyuluhan pertanian yang bersifat *multilevel, multiarah dan multitujuan*. Implikasi lanjut ialah perlunya koordinasi

antar instansi terkait melalui kesinergian, keterbukaan dan keholistikasian pendekatan dalam keterkaitannya dengan otonomisasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian.

Dinamika Kelompoktani

Mekanisme pembinaan terhadap kelompok tidak tercantum dalam SKB Mendagri-Mentan Tahun 1991 ataupun SKB Tahun 1996. Nampaknya, hal ini dianggap sebagai suatu pendekatan yang merupakan urusan praktis di lapangan. Namun, jika mengacu pada pengelolaan BPP seperti tercantum dalam Bab V Pasal 10 dan Pasal 15 SKB Tahun 1996 maka dinamika kelompoktani dalam revitalisasi penyuluhan pertanian diperkirakan akan memerlukan suatu pembenahan diperkirakan akan memerlukan suatu pembenahan manajemen. Isu-isu yang perlu diketahui keberadaannya dan implikasinya di tingkat lapangan serta dicarikan solusinya antara lain:

- 1) Bagaimanakah pemahaman kelompoktani tentang peran dan fungsi BPP dalam konteks otonomi urusan penyuluhan pertanian di daerah.
- 2) Apakah BPP yang kini dikelola oleh Pemda tidak hanya semata-mata melayani urusan penyuluhan pertanian: Lalu bagaimana mekanismenya dan bagaimana keterkaitannya dengan pembangunan lintas sektoral.
- 3) Kepada siapakah kelompoktani datang mencari informasi dan memperoleh bantuan dalam memecahkan masalah pertanian yang dihadapi; apakah kepada penyuluh yang berpangkal di

BIPP atau di BPP. Lalu apakah spesialisasi penyuluh yang tersedia di tiap pangkal unit penyuluhan cukup beragam untuk menelusuri ragam permasalahan yang dihadapi oleh tiap kelompoktani.

Kelompoktani sebagai media komunikasi dalam penyuluhan pertanian berfungsi sebagai forum belajar, aksi bersama, dan unit produksi. Sampai tahun 1991 diperkirakan jumlahnya telah mencapai angka 241.625 kelompoktani yang terdiri dari 226.219 kelompoktani dewasa (93,8%), 4.471 kelompoktani perempuan (1,9%), 6.735 kelompoktani taruna (2,8%), 735 kelompok transmigrasi (0,3%) dan 3.105 kelompok petani kecil (1,2%).

Pada setiap kelompoktani ditentukan petani kontak (Kontaktani) yang berfungsi menjembatani penyuluh dan petani lain yang begitu besar jumlahnya. Menurut data yang dianalisis dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Hubeis, Aida V.S. 1991), kontaktani di Indonesia berjumlah sebanyak 225147 orang yang terdiri dari kontaktani nelayan (219717 orang), kontaktani wanita (4412 orant), dan kontaktani tarunatani (1118 orang). Sebanyak 95 orang di antaranya merupakan KTNA (Kontaktani Nelayan Andalan Nasional).

Posisi kontaktani yang strategis ini seringkali dipadankan dengan sebutan *mitra (patner)* penyuluh. Masalahnya kriteria pemilihan kontaktani acapkali terkaburkan dengan posisinya di masyarakat (Sattibu, Ibin, 1991). Sebagai mitra penyuluh maka jelas sekali kriteria pemilihan kontaktani, mau tidak

mau harus didasarkan pada kemampuannya berperan sebagai petani-pendidik, bukan sebagai petani kaya atau sebagai inovator saja. Karena itu, pendidikan untuk Kontaktani juga perlu mempertimbangkan penempatan kurikulum cara-cara mendidik selain latihan-latihan seperti latihan regional, pembinaan kontaktani kabupaten, kursus, temukarya, percontohan aneka usahatani dapat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai mitra penyuluh yaitu sebagai *pendidik petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian lainnya*.

Upaya menjadikan kontaktani menjadi petani-pendidik dan bukan sekedar penghubung antara penyuluh dan sasaran penyuluhan pertanian yang lebih luas akan menjadikan dan menumbuhkan kemandirian di kalangan petani. Dengan demikian *falsafah* yang selalu didengung-

..... menjalankan fungsinya sebagai mitra penyuluh yaitu sebagai pendidik petani dan keluarganya serta masyarakat pertanian lainnya



dengungkan sebagai petani belajar dari petani akan mempunyai perspektif yang lebih luas bukan sekedar wadah eksperimentasi.

Pengelompokan khalayak sasaran dengan mengikuti karakteristik petani menurut kategori usia, jender, lokasi, status ekonomi seperti diuraikan sebelumnya akan sangat membantu mekanisme alih-informasi teknologi pertanian dalam keterbatasan jumlah penyuluh yang tersedia.

Data sampai tahun 1991 menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian di Indonesia ialah sebanyak 29.530 orang (Hubeis, Aida VS, 1991). Mereka terdiri dari 1.413 orang penyuluh berkualifikasi sarjana (4,78%) dan 27.117 orang non-sarjana (95,22%): Persentase penyuluh pertanian spesialis (Penyuluh Senior) yang diharapkan berfungsi menjembatani hasil-hasil penelitian dengan kegiatan penyuluhan pertanian lapangan relatif masih sangat sedikit dibanding dengan rata-rata persentase untuk negara berkembang yang berkisar antara 8%-20% (FAO, 1990). Hal ini menjadi petunjuk perlunya penambahan jumlah tenaga penyuluh senior dengan strategi dan pendekatan penyuluh senior dengan komposisi spesialisasi yang disesuaikan dengan strategi dan pendekatan penyuluhan yang akan digunakan. Jika diasumsikan pendidikan APP (Ahli Penyuluhan Pertanian setara akademi) sudah mampu meluluskan sekitar dua sampai 3 ribu penyuluh maka masih sekitar 85% penyuluh non sarjana hanya berpendidikan kejuruan (Setara SLTA).

Mengingat pergantian atau mutasi tenaga penyuluh cukup besar maka kebutuhan untuk pengembangan kesempatan profesi dan karir penyuluh perlu distimuli dengan perbaikan pelayanan kepada mereka. Perbaikan kualitas profesional penyuluh perlu dirancang secara terstruktur melalui hal-hal berikut :

- 1) Pendidikan formal seperti APP (Akademi Penyuluhan Pertanian, UT (Universitas Terbuka), atau program pendidikan spesialis satu tahun (SP-1) atau dua tahun (SP-2). Kurikulum pendidikan tersebut dirancang dengan didasari oleh *semangat continuing education* (pendidikan bersambung).
- 2) Kegiatan pelatihan magang (*in-service training*) yang juga dirancang dengan orientasi pada *need assesment* terhadap masyarakat pertanian dan *based competency* sesuai dengan pendekatan penyuluhan yang akan dipakai. Pertimbangan ini sangat penting bagi penyuluh agar dapat berkemampuan prima dalam melaksanakan program penyuluhan yang efektif. Jika ini tidak segera dilakukan maka wajarlah jika penelitian perihal penyuluhan pertanian pada akhirnya berkesimpulan bahwa banyak petani pada era PJPT I tidak lagi berkenan datang menghadiri pertemuan kelompok (*saung meeting*) karena materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh relatif tidak berkembang, itu-itu saja (PPA, 1991). Dalam era PJP II, khususnya pada masa transisi hasil SKB Tahun 1991 dan kemudian diikuti oleh SKB 1996,

persoalannya ialah petani tidak tahu harus pergi kemana untuk memperoleh informasi perihal pertanian, BIPP terlalu jauh untuk dicapai, BPP belum jelas perannya secara konkrit dan pengaturannya masih dalam proses (menunggu SKB baru?).

- 3) Pendidikan formal lanjutan bagi penyuluh spesialis (senior) melalui pendidikan di luar negeri maupun domestik perlu disusun mekanismenya. Maksudnya ialah agar mereka memiliki kemampuan untuk menjadi *perencana strategi penyuluhan* yang dapat mengantisipasi pendekatan penyuluhan (*extension approaches*) yang cocok untuk tiap khalayak sasaran penyuluhan pertanian.

Jika diasumsikan bahwa hanya penyuluh non-sarjana yang melakukan kontak langsung dengan keluarga tani atau kelompok tani, maka rasio penyuluh dengan keluarga tani khalayak sasaran penyuluhan adalah 1:929 dan 1:11 jika melalui kontak tani. Rasio ini masih sangat besar jika dikaitkan bahwa hampir sepertiga waktu penyuluh dihabiskan untuk kegiatan non-penyuluhan, seperti membuat laporan kegiatan atau menghadiri rapat yang jelas merupakan gambaran hilangnya waktu yang sangat banyak dan sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Untuk mengatasi hal ini maka fungsi dan profesi penyuluh perlu dikaji ulang dalam inti *semangat untuk menempatkan penyuluh dan penyuluhan sebagai suatu profesi pendidik masyarakat pertanian yang profesional*.

PENGALAMAN SISTEM KERJA PENYULUH DI WILAYAH SAWIT DUPA

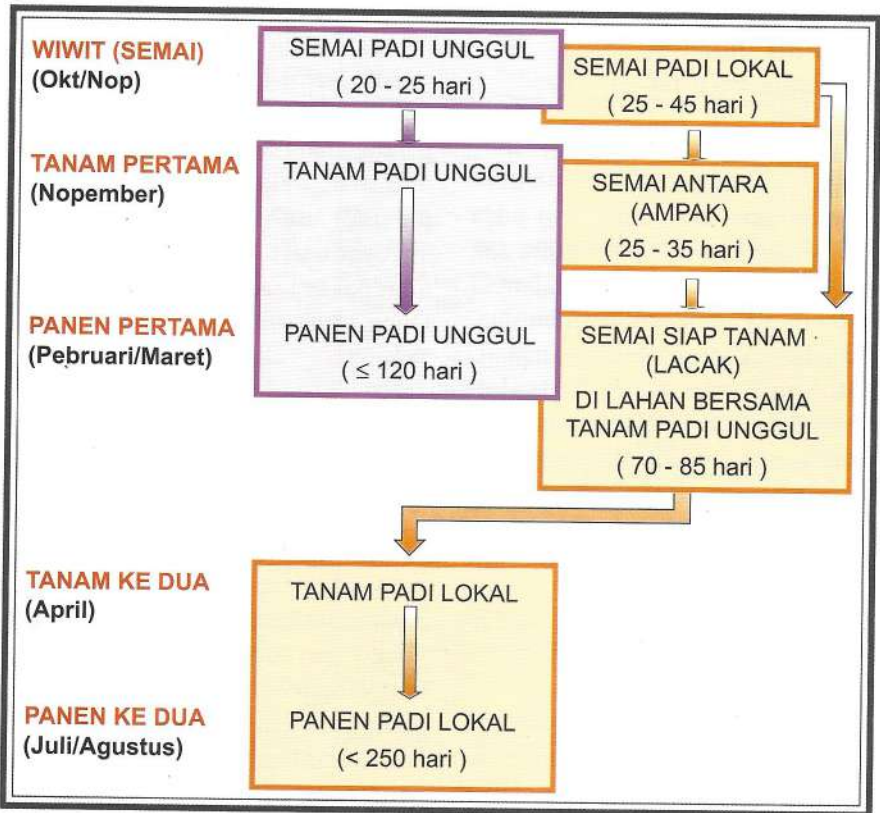
oleh : *M. Yunus Jarmie*

SAWIT DUPA DAN PENGEMBANGANNYA

1. Sawit Dupa sebagai Pola Tanam

Pola tanam padi *Sekali Mewiwit* (=menyemai) Dua Kali Panen disingkat *Sawit Dupa*, merupakan awal perubahan usahatani berbasis

padi yaitu dengan menyelaraskan antara bertanam padi lokal satu kali panen setahun (yang lama) dengan menyisipkan bertanam padi unggul (yang baru) sehingga diperoleh dua kali panen setahun. Dengan Sawit Dupa terjadi peningkatan Indeks Panen dari 100 % menjadi 180 % yaitu seperti dikemukakan pada *Gambar 1*.

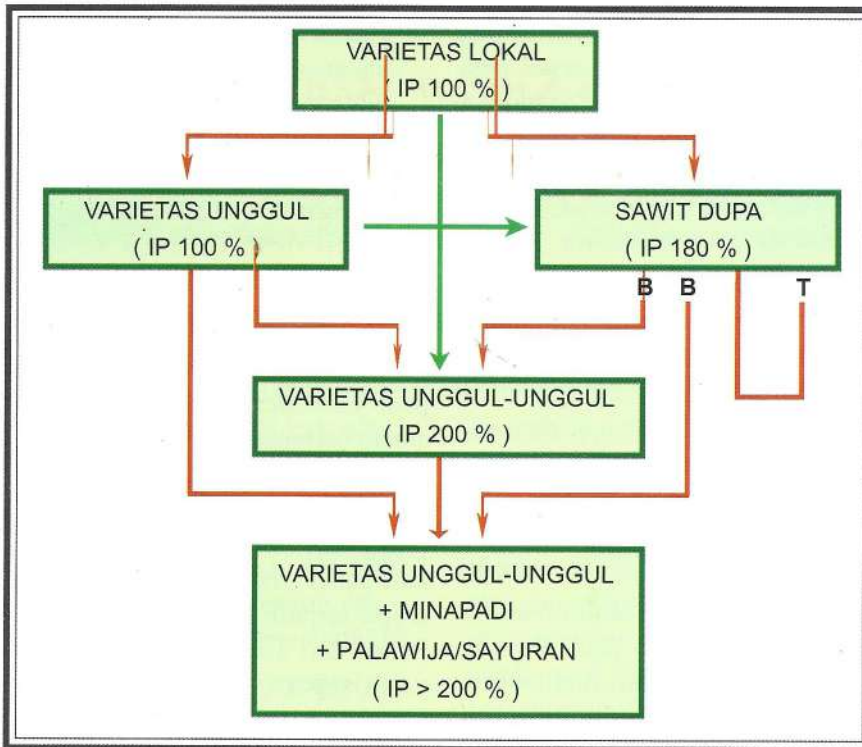


Gambar 1. Pola tanam padi Sawit Dupa di Lahan Pasang Surut, Lahan Tadah Hujan dan Lahan Lebak Watun Satu.



DR. Ir. M. Yunus Jarmie

Penyuluh Pertanian
Provinsi Kalimantan
Selatan



Gambar 2.

Perubahan Pola Tanam dalam Model Usahatani Berbasis Padi (Rice Base Model) pada Lahan Pasang Surut, Tadah Hujan dan Lahan Lebak Watun Satu.

Keterangan :

B = Budaya

T = Teknologi

2. Sawit Dupa dalam Perubahan

Pola tanam Sawit Dupa merupakan teknologi (T) sementara (sebelum ada teknologi baru) pada lahan pasang surut, tadah hujan dan lebak watun satu dengan kedalaman air lebih 30 cm saat tanam ke dua. Pada lahan yang lebih dangkal, tentunya Sawit Dupa hanyalah merupakan budaya (B) antara yang untuk menjadi usahatani yang lebih intensif dengan IP > 100%. Ke dua perubahan tersebut seperti pada Gambar 2.

3. Arah Pengusahaan Sawit Dupa

Pada awalnya usahatani secara migrasi sirkuler, bertanam padi untuk konsumsi sendiri sambil mencari ikan, memiliki ternak dan mengambil hasil hutan. Berikutnya

menggunakan perbaikan usahatani seperti Sawit Dupa, mengusahakan hortikultura, ternak dan ikan sebagai pendapatan mingguan, bulanan dan musiman. Selanjutnya berkembang menjadi usahatani agribisnis dan agroindustri. Perubahan yang merupakan arah pengusahaan Sawit Dupa (Jarmie, 1995) seperti pada Tabel 1.

4. Pendorong dan Penghambat Sawit Dupa

Pengusahaan Sawit Dupa (Tabel 1) diarahkan dari petani subsisten menjadi petani komersial. Perbaikannya antara lain (1) kehidupan yang koperatip di dalam berusaha-tani yang lebih menguntungkan (2) menggunakan kemudahan sarana dan Kredit Usahatani, pra sarana dan pemasaran, (3) menggunakan informasi pembangunan dalam keputusan usahatani, (4) semuanya

Tabel 1. Perubahan Usahatani (dan petani) Lahan Pasang Surut, Lahan Tadah Hujan dan Lahan Lebak Watun Satu dari Era Subsistem ke Era Komersial.

No.	Ciri-ciri Perubahan Usahatani (dan Petani)		
	Satu (Pemula)	Dua (Berkembang)	Tiga (Maju)
1.	Sebagian masih berusahatani secara migrasi sirkuler	Usahatani menetap dan menggunakan ide baru, sebagian menjadi anggota KUD	Usahatani menetap, menggunakan ide baru secara koperatip, menjadi anggota KUD
2.	Usahatani untuk kebutuhan sendiri	Usahatani kebutuhan sendiri dan untuk kebutuhan pasar	Usahatani untuk kebutuhan pasar diusahakan cara koperatip
3.	Sumber informasi dari lingkungan dari lingkungan petani sendiri	Sumber informasi dari luar dan dalam petani	Sumber informasi didominasi dari luar petani (informatif)
4.	Padi varietas lokal satu kali panen per tahun (di lahan bawah)	<i>Sawit Dupa</i> di lahan bawah	Padi unggul-unggul secara Mina Padi + Palawija (di lahan bawah)
5.	Penanganan Sapta Usaha parsial	Penanganan Sapta Usaha belum menyeluruh	Penanganan Sapta Usaha menyeluruh
6.	Galengan di sawah mulai ditanami dengan sayuran	Mulai berkembang Sistem Sorjan, lahan atas sayuran dan hortikultura	Sistem Sorjan dengan Tata Air Mikro, lahan atas hortikultura dan sayuran
7.	Menangkap ikan	Memelihara ikan untuk sendiri dan berlebih untuk pasar (lebih padat karya)	Memelihara ikan untuk kebutuhan pasar (lebih pada modal dari padat karya)
8.	Unggas dan Ternak belum diusahakan	Usaha ternak dengan pasar bebas	Usaha ternak dipasarkan secara koperatip al KUD
9.	Lahan pematang ditanami buah-buahan	Lahan pematang diusahakan tanaman perkebunan	Lahan pematang diusahakan tanaman perkebunan menurut kebutuhan pasar

dilakukan secara berencana. Perbaikan tersebut secara biologis menuntut adanya varietas padi (tanam ke dua) yang bisa ditanam pada kedalaman air > 30 cm. Dengan Sawit Dupa siklus hama seperti tikus terus berkelanjutan. Penghambat lain, sebagian petani mempunyai pilihan usahatani lain dan paling besar hambatannya ialah petani belum mau menerapkan.

Pendorong Sawit Dupa cukup banyak, misalnya petani kita sudah tahu adanya padi varietas unggul dan sebagian ada yang pernah mencoba

mengusahakannya. Harga gabah yang cukup tinggi pada saat panen pertama, karena saat itu menjelang paceklik. Beberapa studi kasus usahatani tanpa pengolahan tanah dengan menggunakan herbisida Para-Col, diperoleh informasi bahwa pendapatan Sawit Dupa lebih baik dari lainnya, seperti Tabel 2.

Pendorong lain ialah tersedianya 1.579.356 ha lahan (dan petani) yang sekaligus peluang dan tantangan bagi pengembangan Sawit Dupa yaitu pada Tabel 3.

Tabel 2. Analisis Usahatani Berbagai Pola Bertanam Padi di Kalimantan Selatan (Luasan 1 ha Tahun 1994)

No.	Pola	Unggul-unggul	Sawit Dupa	Lokal
1.	Biaya Produksi Usahatani (Rp)	1.240.400,-	1.228.200,-	601.000,-
2.	Harga jual produksi (Rp)/th	2.269.000,-	2.431.000,-	1.155.000,-
3.	Pendapatan Petani pemilik penggarap	1.416.600,-	1.570.800,-	821.900,-
4.	Pendapatan petani penggarap	1.028.600,-	1.202.800,-	553.900,-

Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan Pasang Surut dan Lahan Lebak Watun Satu Potensi Tadah Hujan

Propinsi	Pasang Surut		Lebak Satu		Tadah Hujan	
	1 kali	2 kali	1 kali	2 kali	1 kali	2 kali
Sumsel	126.600	17.400	238.600	6.200	45.327	9.889
Kalsel	128.900	13.600	13.600	3.700	123.038	10.356
Kalteng	74.900	24.000	114.500	10.000	43.043	8.451
Jambi	61.800	400	68.600	1.900	17.455	656
Kalbar	53.100	10.500	102.200	13.100	99.376	15.829
Riau	43.200	700	82.500	15.200	51.553	4.414
Kaltim	7.100	600	57.300	2.500	26.664	8.059
Jumlah	495.600	67.200	677.300	52.600	406.456	57.654

Sumber :

*BPS (1993) dan
Dit BRPL (1995)*

DORONGAN PADA PERUBAHAN PENYULUHAN

1. Dorongan Percepatan Perubahan Petani

Periode sepertiga abad terakhir, keadaan petani Indonesia telah berubah dengan cepat. Perubahan petani dan warga desa secara dinamis didorong oleh adanya revolusi hijau, revolusi transportasi, peningkatan pendidikan dan revolusi komunikasi. Revolusi hijau pada awal Pelita I, dicirikan oleh penemuan varietas padi berumur pendek, responsif pada pemupukan sehingga produktivitas dalam satuan waktu dan luas tinggi. Revolusi hijau menjadikan makin mantapnya kebersamaan dan ketergantungan antara fungsi penelitian, penyuluhan dan petani. Dampaknya petani tanggap pada ide baru yang ditunjukkan oleh mutu intensifikasi, Indeks Panen > 100 %, dan lain-lain.

Revolusi transportasi dan perkembangannya pada Pelita II dicirikan oleh pembangunan jalan, jembatan dan transportasi yang menghubungkan desa kota, sehingga isolasi dapat dipatahkan. Petani dan warga desa lainnya menjadi terbuka pada pengaruh luar yang memungkinkannya membanding dan belajar dari keberhasilan orang lain. Keterbukaan itu mengakibatkan kebutuhan petani bertambah dan menuntut usaha yang lebih intensif guna memperoleh pendapatan riil yang tinggi.

Berbarengan dengan revolusi transportasi, pembangunan di sektor pendidikan formal dan non formal maju pesat. Hasilnya, petani mampu menghitung dan merencanakan usahatani serta mengusahakan

komoditas unggulan. Revolusi komunikasi dicirikan adanya perangkat keras seperti radio, televisi dan berbagai media massa yang pemilikannya dapat terjangkau oleh daya beli petani. Akibatnya, secara bertahap petani menjadi masyarakat informatif.

2. Perkembangan Penyuluhan Pertanian

Adanya revolusi hijau, revolusi transportasi, peningkatan pendidikan, revolusi komunikasi dan perkembangannya berdampak pada perubahan petani dan usahatani. Jarmie, 1994 menunjukkan perkembangan pembangunan selama ini menghasilkan tiga variasi, antara lain karena perbedaan lahan usahatani, perbedaan prioritas pembangunan dan perbedaan kemampuan petani.

Secara keseluruhan petani Indonesia sedang berubah dari petani subsisten menjadi petani komersial, dengan perubahan yang bervariasi : yang mulai berkembang atau pemula (wilayah I), berkembang (wilayah II) dan yang maju (wilayah III). Pada wilayah I, petani baru menerima ide baru perbaikan usahatani secara parsial dengan Indeks Panen 100 % dan dibeberapa kasus ada yang lebih, merencanakan usahatani karena penyuluh, kurang informatif dan sebagian besar komoditas usahatani untuk kebutuhan sendiri. Wilayah II, menerima ide baru perbaikan usahatani dengan komoditas ganda, merencanakan usahatani, informatif meski masih didominasi dari dalam dan usahatani utama berorientasi pasar. Wilayah III, menerima dan menggunakan ide baru perbaikan usahatani dengan IP > 100 %

merencanakan usahatani, informatif, berorientasi pada pasar dimana pendapatan riil melatar belakangi usahatani.

Variasi perubahan petani (dan usahatani) menghendaki adanya strategi, metoda maupun teknik penyuluhan yang berbeda. Pada Wilayah I karena masih pemula, lebih menekankan pada cara-cara penerapan ide baru ditambah dengan mengapanya. Filosofinya ialah penyuluh untuk petani. Di wilayah II lebih menekankan pada alasan-alasan mengapa ide baru diterapkan.

Dibeberapa kasus masih menekankan pada cara penerapan, filosofinya ialah penyuluh bersama petani. Wilayah III, menekankan pada alasan mengapa ide baru diterapkan dengan filosofi penyuluh penasehat petani.

SISTEM KERJA PENYULUH DI WILAYAH SAWIT DUPA

1. Sistem Kerja Penyuluh

Sistem adalah sejumlah unsur yang mempunyai fungsi di mana satu dengan lainnya dalam kebersamaan dan ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan pada sistem penyuluhan pertanian untuk meningkatkan kualitas hidup petani yang sejajar dengan kemajuan non petani. Indikatornya adalah Indek Mutu Hidup; kebutuhan keluarga (pangan, pakaian, perumahan, kesehatan dan pendidikan); kebutuhan sebagai pengusaha usahatani; dan kontribusi pada pembangunan seperti surplus produksi pertanian dan penyediaan bahan baku industri sesuai potensi,

memberikan sumbangan pembangunan seperti pemenuhan perpajakan dan pemeliharaan bangunan pertanian, meningkatnya mutu kerja dan penggunaan peluang kerja.

Sebagai sistem, pada penyuluhan berperan sejumlah fungsi antara lain fungsi penelitian, penyuluhan, pengaturan, pelayanan, informasi dan pasar dengan kontribusi yang berbeda menurut variasi kemajuan petani (dan usahatani). Pada wilayah pemula, kontribusi fungsi pelayanan (28,14 %) dan fungsi pengaturan (24,50 %) mendominasi sistem kerja penyuluh di dalam mendukung aktivitas fungsi penyuluhan (24,59 %). Fungsi lainnya masih bersifat pelengkap, yaitu fungsi informasi (12,59 %), fungsi penelitian (8,16 %) dan fungsi pasar (1,63 %).

Sistem kerja penyuluh di wilayah II didominasi oleh fungsi pasar (24,36 %), fungsi pelayanan (22,65 %) dan fungsi informasi (21,56 %) di dalam mendukung fungsi penyuluhan (17,02 %), dominasi dari fungsi pengaturan (17,02 %) berkurang fungsi penelitian (9,55 %) mulai meningkat keberadaannya. Di wilayah yang maju, didominasi oleh fungsi pasar (31,21 %) dan fungsi informasi (22,10 %) di dalam mendukung fungsi penyuluhan (15,01 %), makin berkurangnya peran dari fungsi pengaturan (8,78 %) dan makin meningkatnya peran dari fungsi penelitian (11,06 %).

2. Penyuluhan di Wilayah Sawit Dupa

Kedudukan Sawit Dupa sebagai materi penyuluhan dan proses perubahan berada pada wilayah II. Sebagai proses perubahan diasumsi-

kan sebagai kurva normal, tentu petani (dan usahatani) di wilayah II itu masih ada sebagian kecil yang berada di wilayah I (pemula), sebagian besar sedang berada di wilayah II dan sebagian kecil lagi telah melangkah pada wilayah III yang merupakan perubahan-perubahan yang diinginkan (Tabel 1).

Untuk petani (dan usahatani) wilayah I diperlukan perubahan :

1. Tumbuh dan berkembangnya pemimpin kelompok tani hamparan maupun domisili.
2. Berubahnya petani dari migrasi sirkuler menjadi menetap dengan adanya usahatani yang memberikan hasil mingguan, bulanan dan musiman.
3. Menumbuhkembangkan Sawit Dupa maupun yang setara.
4. Digunakannya ide baru perbaikan usahatani.
5. Menumbuhkembangkan aneka usahatani sekaligus merintis komoditas unggulan.

Untuk mempercepat perubahan pada wilayah I diperlukan peran dominan dari fungsi pelayanan dan pengaturan di dalam mendukung penyuluhan. Sarana produksi dan peralatan pertanian tersedia dengan tepat di petani. Di dalam mendukung fungsi pengaturan diperlukan kegiatan seremonial, misalnya pengukuhan kelompok tani kelas pemula oleh Kepala Desa, kelas lanjut oleh Camat, sejumlah acara panen oleh Kepala Daerah, Pertemuan di lapang yang dibuka dan dipimpin Kepala Daerah. Peran penyuluh sebagai **motivator** (mendorong petani menggunakan lahan

dan kemudahan berusaha) yang mendukung digunakannya ide baru dan membantu mengarahkan penggunaan hasil pada pemenuhan kebutuhan hidup), **edukator** (meningkatkan pengetahuan petani untuk bisa menilai, melatih keterampilan dalam memodifikasi, dan bersikap positif pada ide baru karena menghayati manfaatnya), serta **penghubung/perakit** antar fungsi-fungsi yang terkait, karena dianggap penyuluhlah yang sangat berkepentingan.

Sistem kerja penyuluh di wilayah Sawit Dupa mendukung peran fungsi pasar, pelayanan dan informasi yang lebih mendominasi dalam percepatan perubahan. Petani (dan usahatani) di wilayah II untuk berada pada peringkat wilayah III. Dominasi fungsi pengaturan dikurangi dan fungsi penelitian mulai ditonjolkan. Penyuluh sebagai edukator mulai berkurang, khususnya bagi yang sudah menggunakan ide baru dengan baik setelah berhasil minimal 3 kali panen (Jarmie, 1995).

Untuk itu petani (dan usahatani) wilayah II diperlukan perubahan yang menjadikannya :

1. Semakin membudayanya perbaikan yang baru dimulai pada peringkat wilayah I (pemula)
2. Tumbuh dan berkembangnya usahatani yang berpeluang pasar regional dan yang lebih luas.
3. Pemupukan modal keluarga dan modal bersama dalam kehidupan secara koperatif melalui kelompok-tani dan KUD.
4. Tumbuh dan berkembangnya usahatani yang mengarah pada padat modal.

5. Mulai tampil komoditas unggulan yang mampu bersaing secara regional dan yang lebih luas.

Untuk mempercepat perubahan pada wilayah II menjadi wilayah III diperlukan upaya penyuluh di dalam fungsi pasar, fungsi pelayanan dan fungsi informasi. Dalam kaitan Warung Serba Ada (Waserda) milik KUD, peran kelompok tani di dalam pengadaan pangan. Dalam fungsi pelayanan, kedudukan kelompok tani beralih dari menerima dan menggunakan sarana dan peralatan pertanian menjadi mengusahakan secara kelompok dengan bimbingan fungsi pelayanan. Digunakannya informasi pembangunan pertanian oleh petani yang dipublikasikan dan diperuntukkan bagi petani seperti informasi harga pasar, forum Bina Tani, Siaran Pedesaan, Koran Masuk Desa, dll di dalam pertimbangan keputusan materi usahatani. Peran penyuluh lebih pada peran dinamisor (mendorong petani untuk merencanakan dan memilih usahatani yang lebih untung melalui diversifikasi usahatani) dan peran organisator (mendorong kebersamaan antar petani dan masyarakat lainnya dalam meningkatkan pendapatan keluarga, pendapatan kelompok, sekaligus pula kehidupan masyarakat).

Pada petani (dan usahatani) wilayah III diperlukan materi penyuluhan yang mendorong berkembangnya usahatani yang siap bersaing secara regional dan global. Untuk itu diperlukan :

1. Panen secara teratur dan berkesinambungan.

2. Mutu dan volume produk dapat dikendalikan.
3. Mudah diusahakan dan dipasarkan oleh petani sendiri secara individual, secara berkelompok maupun melalui mitra usaha.

Peran penyuluh lebih pada sebagai komunikator (mencari dan mengkomunikasikan ide baru pembangunan dalam perbaikan usahatani serta pada keadaan diperlukan membantu petani dalam proses keputusan) dan sebagai penasehat (mencarikan pilihan dalam perbaikan usahatani yang diminta petani dan membantu pemecahan masalah pembangunannya).

KESIMPULAN

1. Sistem kerja penyuluh di wilayah Sawit Dupa adalah sistem kerja pada era petani (dan usahatani) wilayah II yaitu telah menerima ide baru perbaikan usahatani dengan komoditas ganda; merencanakan usahatani; informatif, walaupun masih didominasi dari dalam sistem sosialnya; dan usahatani utama berorientasi pasar.
2. Pada wilayah Sawit Dupa sistem kerja penyuluh didominasi oleh peran dari fungsi pasar, fungsi pelayanan dan fungsi informasi, peran dari fungsi pengaturan berkurang dari wilayah I sementara peran dari fungsi penelitian meningkat. Kedudukan penyuluh lebih pada sebagai penghubung/perakit antar fungsi dan perannya yang menonjol sebagai dinamisor dan organisator



Anak negeri ribuan pulau yang disatukan
pantai dan lautan,
tak bisa diabaikan,
tak bisa di pandang sebelah mata

Justri, membuat mata makin terbuka
Mereka berbeda dengan masyarakat darat
Pernahkah kita beresmi yang terlihat,
bukan hanya yang terpaang disini

Tari,
tarian ombak, galangan kapal, industri ikan
dan masyarakat pantai yang beresmi
melantarkan syonon yang tak pernah sepi

Tantangannya,
mereka, anak negeri sepanjang pantai
justri tak bisa dipandang sebelah mata
dan tak bisa dijawab
dengan sebatas waktu mata berkedip

andi sumarga





*Imi seni, bung !
Yang hadir tak mewaksa, namun sangat tekasa
dalam getar dan gasing resonansi hidup
yang berdesir dan berbauk dalam satu dramaika yang serasi*

*Imi seni, bung !
Yang berbisik diantara denyut nadi dan omong petani
yang mekrona diantara hijau baorakan peksada
Apalagi yang hendak dicari ?
jika seni sudah mengisi, petani makin bisa berlari
mandiri dan sepenuh hati*

andi sumarga







Penyuluh Pertanian, hendak dibawa kemana?

Bak gadis ranum, yang sedang mekar-mekarnya, hingga banyak diperebutkan orang, dilamar orang sana dan orang sini, tidak yang muda apalagi yang tua, sama-sama saling menghendakinya! Begitulah ibaratnya nasib penyuluh pertanian yang digonjang ganjing kesana kemari.

Jsu angin puting beliung seperti termuat pada rubrik CENGERAMA yang lalu belum selesai kita "kencani", mendadak pula secara tiba-tiba kita mendapat "angin baru" yang merebak, mendesir lirih berbisik pada atmosfer dunia penyuluhan pertanian kita. Bisikan "angin baru" ini memang bukan main dampaknya, meskipun tidak seperti angin puting beliung yang

melingkar-lingkar, berpusing berkeliling hingga membuat pusing tujuh keliling! "Angin baru" ini cenderung lebih tegas, langsung pada sasaran pokok, membawa misi yang bukan main, yang mau tidak mau kita para penyuluh akan menolehnya, akan mencermatinya, karena bagaimana pun juga sangat dekat keterkaitannya bagi masa depan dunia penyuluhan pertanian yang kita cintai ini.

Oleh karena itu, dalam rubrik CENGERAMA kali ini sengaja kita ungkap lebih dulu mengenai riak-riak dinamika para penyuluh didalam menanggapi kehadiran SKB Mendagri-Mentan 1996.

Masalah "Angin Puting Beliung" diseputar pupuk urea tablet kita simpan sementara. Kepada rekan-rekan yang telah mengirimkan "cengerama"-nya mohon sabar dulu, di volume mendatang kita ungkap sumber pusaran angin puting beliung itu.

Pengalaman yang tak ternilai

Apa yang menjadi tujuan rubrik ini, bukanlah sekedar obrolan santai tanpa arah, bukan pula omong-omong kosong tanpa isi, namun disela-sela canda, tawa dalam keakraban bercengerama kadang terdengar lontaran ungkapan pengalaman yang layak untuk didengar.

Semata-mata, hanya karena pengalaman yang teramat berharga itulah rubrik ini diturunkan. Sehingga apa yang mereka lihat, dengar, rasakan dan dialami tersebut melalui perjalanan panjang, kerja keras dan perjuangan tanpa henti, sesungguhnya merupakan pancaran inovasi yang berharga, pengalaman yang memberikan nilai tambah pada lingkungan organiknya. Sehingga, pengalaman tersebut hendaknya juga dapat mengalir, berputar makin membesar saling berbagi dan memberi serta menjadi pengalaman milik kita bersama.

Semoga.

Untuk sekarang, **CENGERAMA** kita pusatkan dulu pada "angin Baru" di penyuluhan pertanian kita ini.

Isu "angin baru" adalah isu dibalik SKB Mendagri dan Mentan tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian, yang dalam rubrik **CENGERAMA** kali ini diungkap oleh para penyuluh pertanian karena memang mereka pelaku yang tidak saja hanya berbicara, tetapi penjelajahan mereka didasarkan kepada apa yang telah mereka alami pada dunia penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang menjadi bagian hidup mereka.

Saudara para penyuluh pertanian dimana pun anda berada, inilah ungkapan sebagian rekan penyuluh pertanian kita seputar "angin baru" yang berbisik lirih menyentuh atmosfer dunia penyuluhan pertanian ini itu.

Ir. Machmud Tan, PPS Koordinator Tanaman Pangan Provinsi Maluku. Menurutnya dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian ini perlu mempertimbangkan kondisi spesifik wilayah. Indonesia dengan keanekaragaman kondisi baik agro-ekosistem, maupun sosial ekonominya di berbagai wilayah harus dicermati pula pola-pola pewilayahan penyuluhan pertanian, terutama mengenai alokasi dana dari tingkat pusat. Salah mendefenisikan spesifikasi suatu wilayah atau cenderung menyamaratakan penanganan penyuluhan untuk semua wilayah. Kesemuanya itu mengisyaratkan kegagalan! Apa pun yang akan dilaksanakan.

Di sisi lain dia mengajak kita bernostalgia pada masa-masa dulu, dimana menjadi penyuluh pertanian itu harus melewati sejumlah pendadaran alias sejumlah pelatihan yang bertahap; baru kemudian akan lahir sosok penyuluh pertanian yang siap bekerja, berjuang bersama petani dalam dinamika pembangunan pertanian di wilayahnya masing-masing.

Kelompok penyuluh pertanian Kotamadya Palangkarya. Mengungkap antara harapan dan kenyataan yang dihadapi penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya. Lebih jauh diungkapkan bahwa iklim kondusif yang membuat rasa aman bagi penyuluh pertanian, akan membangkitkan gairah dan semangat kerja tugas penyuluh di lapangan!

Lepas dari itu semua, rasanya memang ada yang menyesakkan dada, yang membuat nafas ini makin sesak yang harus dihembuskan lewat sebuah pertanyaan pada kapasitas seorang penyuluh pertanian, *Mau dibawa kemana penyuluh pertanian itu?* Meski pun SKB itu sendiri telah memberikan kejelasan arah dan tujuan yang menjadi acuan, tetapi tentunya apa yang menjadi misi SKB itu sendiri (mengacu pada pengalaman yang dulu-dulu). Biasanya akan ada masa-masa mengambang yang kadang menjadikan posisi penyuluh pertanian menjadi tidak jelas! Dan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, perlu tindakan antisipatif, perlu menumbuhkan daya juang yang lebih intens! Terutama oleh kita, para penyuluhnya itu sendiri!

andi sumarga

Pewilayahan Penyuluhan Pertanian

Oleh : *Ir. Machmud Tan*

Reorientasi pembangunan pertanian, tentunya harus juga direspon dengan reorientasi semua jajarannya termasuk manusia penyuluh pertanian itu sendiri. Sementara itu konsekuensi logisnya "angin baru", berupa misi yang dibawa SKB Mendagri dan Mentan, terutama tentang pembentukan BIPP yang secara bertahap sebagai "sarang"nya penyuluh pertanian dihadapkan pada berbagai tantangan.

Kondisi Jawa dan Sumatera jangan disamakan dengan Indonesia bagian timur. Dengan Maluku saja kondisi agroekosistemnya berbeda. Harusnya ada pewilayahan penyuluhan pertanian. Jangan digeneralisir, disama-ratakan semua wilayah model dulu. Jika itu disama-ratakan, terutama dalam hal dana, maka akan ada kaidah-kaidah penyuluhan yang diamalkan secara tidak taat azas. Kalau pengamalan metode itu sudah tidak tata azas lagi maka hancurlah yang namanya penyuluhan pertanian! Mari kita pikirkan adanya pewilayahan penyuluhan pertanian!

Sebagai contoh, di Maluku yang disebut sebagai provinsi hampir seribu pulau, tepatnya 999 pulau yang tersebar di provinsi Maluku yang disatukan oleh laut dan lautan, Tentunya berbeda dengan provinsi di Pulau Jawa. Jika di Jawa bepergian

itu berangkat pagi, maka sore bisa pulang. Tetapi di Maluku tidak bisa begitu. Ada kalanya berangkat pagi, 2 - 3 hari bahkan satu minggu baru bisa pulang. Belum lagi ongkosnya, satu kali jalan untuk wilayah yang cukup jauh, seorang PPL bisa mengeluarkan kocek sebesar Rp. 60.000,-.

Coba bayangkan seandainya dari sisi dana saja, PPL di provinsi Maluku uang jalannya sama dengan uang jalan PPL di provinsi Jawa. Tentunya ini akan menyebabkan ketimpangan, PPL di provinsi Maluku akan selalu kekurangan dana. Itu dari sisi dana belum lagi sisi-sisi lain, mengingat penyuluhan pertanian itu adalah dinamika proses dalam mendidik masyarakat. Jadi sangatlah wajar bila ada pewilayahan penyuluhan pertanian, yang tidak menyamaratakan penanganan penyuluhan di semua wilayah di Indonesia ini.



Ir. Machmud Tan

PPS Koordinator
Tanaman Pangan
Prop. Maluku

Belum lagi pembentukan BIPP sebagai kelembagaan baru tentunya memerlukan tangan-tangan terampil yang memahami dunia penyuluhan itu sendiri dan lebih arif dalam membangun kerjasama dengan semua pihak baik dinas mau pun instansi yang telah lama ada. Selain itu BIPP itu sendiri dihadapkan pada tantangan untuk membangun kekuatan intern, membangun profesionalisme para penyuluh pertanian yang diwadahnya, menciptakan iklim yang lebih kondusif di mana manusia penyuluh pertanian yang ada di dalamnya lebih banyak memanfaatkan waktunya untuk belajar dan berlatih membangun profesionalisme baik sendiri sendiri maupun secara kelompok.

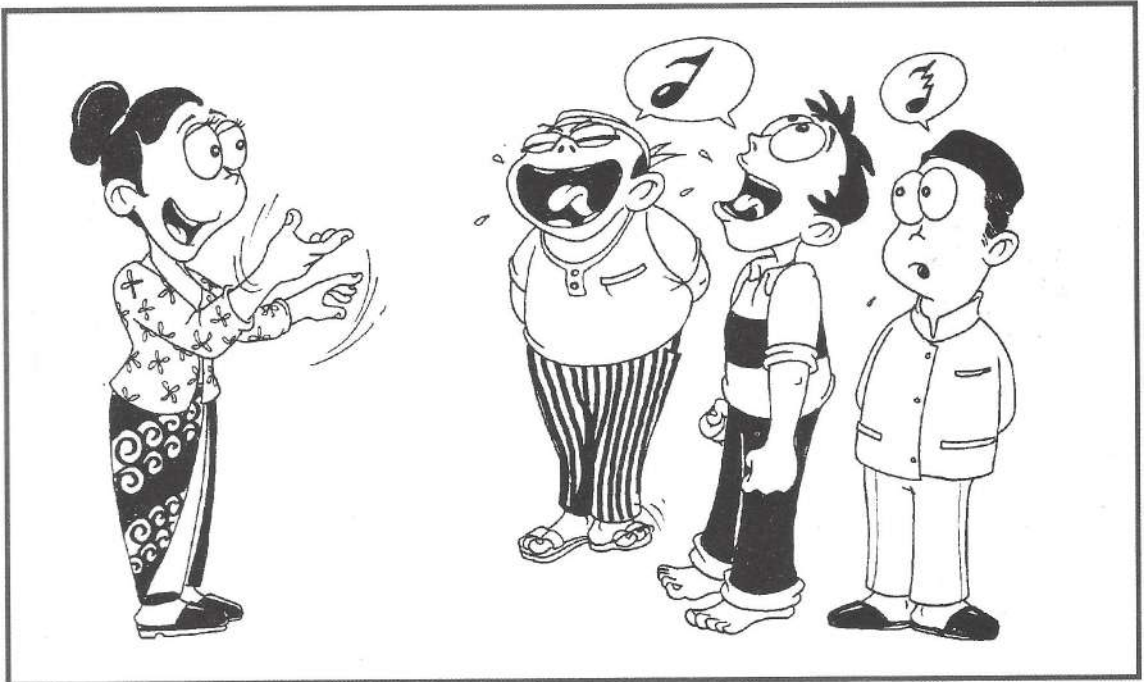
Tanpa itu semua, tanpa membangun profesionalisme yang lebih baik yang merupakan jiwa BIPP itu sendiri, maka mungkin sejarah akan terulang kembali dimana BIPP

perlahan-lahan menjadi bangunan tua yang tiada guna.

Dulu penyuluh itu dibagi-bagi, sekarang disatukan lagi dalam wadah BIPP, bagi saya tidak menjadi masalah. Karena sebagai fungsional dimana pun saya berada di situlah rumah saya. Yang penting peran dan fungsi saya sebagai penyuluh tidak dikebiri!

Memang seharusnya tidak sembarang orang bisa menjadi penyuluh pertanian, ada kualifikasi tertentu. Dulu di tahun 1970/1980-an, jika seseorang menjadi penyuluh pertanian, ada pendadaran tertentu, ada berbagai pelatihan yang mengikutinya. Dimulai pelatihan Orientasi yang mengenalkan seseorang itu pada dunia penyuluhan, ada pelatihan Dasar Satu dan Dua yang mengenalkan orang pada berbagai pola, metoda dan sistem kerja yang akan dilakukan oleh seorang penyuluh pertanian, ter-

*"Samakan suaranya,
PENYULUHAN
PERTANIAN!"*





DJOKO PURWANTO

Dulu Penyuluh pernah jadi idola

Jika ada orang bingung atau *stress* karena pekerjaannya bertumpuk, tak habis-habisnya selesai dikerjakan; maka bagi Djoko Purwanto justru sebaliknya ! Dia akan bingung dan *stress* bila tidak ada pekerjaan. *"Lho! kerja itu kan semisal orang "refreshing", dan membuat hidup ini menjadi lebih bersemangat, lebih bergairah mengejar berbagai tujuan yang juga seolah tak pernah habis. Tak terbayangkan, andai hidup ini tanpa kerja dan menganggur tanpa tujuan"* begitu ungkapnya di sela-sela suasana "Coaching Fasilitator Stimulasi Program DPG" di BLPP Ungaran - Jawa Tengah.

Tujuh belas tahun silam (1979), Djoko muda selepas pendidikan SPMA, dengan ragu-ragu memasuki dunia penyuluhan pertanian sebagai PPL di WKPP Tersono, Kabupaten Batang - Jawa Tengah. *"Ketika itu,"* katanya *"Sosok PPL begitu populer, dan menjadi sosok idola. Tidak saja di kalangan petani nelayan, tetapi juga di kalangan masyarakat desa pada umumnya. Sampai-sampai sepeda motor yang menjadi kendaraan PPL sangat dikenal luas oleh masyarakat. Ada motor PPL yang mangkal, menjadi indikator keberadaan PPL-nya itu sendiri!"*

Begitu dekat dan melekatnya antara PPL dan masyarakat tani khususnya, kadang menimbulkan "keirian orang" yang justru terasa

membanggakan. Pak Camat kadang secara berkelakar sering menyebutkan, bahwa yang sesungguhnya layak dan wajib disebut "Camat" itu adalah Pak mantri ini, PPL ini; karena kemanapun PPL ini berkunjung selalu *"disowani"*, selalu dibekali. *"Tetapi tidak untuk Camat yang sesungguhnya! Sungguh dunia ini terbalik"* Lanjutnya sambil tertawa! Ini pengalaman manis yang sangat mengesankan, betapa antara PPL dan petani nelayan begitu akrab, dekat dan melekat, bak kembang dengan harumnya yang seolah menjadi satu kesatuan utuh, dimana ada kembang disitu pasti akan tercium aroma harum, kembang dan keharumannya memang menyatu, tak dapat dipisahkan. Begitu pun PPL dan petani nelayan ketika itu!

Menyambut babak baru penyuluhan pertanian, cermin kita kali ini menampilkan sosok Djoko Purwanto, seorang penyuluh yang diajak ekstensia untuk bercermin melihat sejenak masa silam yang pernah dilewatinya.

Namun menurutnya kemudian, *"seperti perahu sampan di tengah kehidupan samudera yang maha luas ini, kadang tenang, kadang diterjang badai! Tak selamanya gelombang itu ada di atas, tak selamanya pula gelombang itu ada di bawah. Gelombang itu kadang naik, kadang turun mengikuti irama angin yang menjadi atmosfernya"*. Begitu pun dunia penyuluhan yang dimasukinya, seolah mengikuti irama kehidupan! Tempat kerjanya pun berpindah pindah, 5 tahun di WKPP Tersono, 4 tahun di WKPP Tragung, 4 tahun di WKPP Gamer, dan sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang dia bekerja di SPH Bimas Kabupaten Batang.

Selama itu dunia penyuluhan pun mengalami pasang surut! *"Saya mengalami saat-saat penyuluh pertanian menjadi idola, menjadi primadona di desa. PPL ketika itu begitu dianut, begitu disegani, begitu dihargai. Penghargaan yang demikian tulus dari masyarakat itu membangkitkan semangat dan gairah kerja yang makin meluap-luap! Seolah-olah tak ada kerja lain selain memuaskan dan melebihi aspirasi petani nelayan itu sendiri!"*

Kemudian seiring dengan perubahan waktu, pekerjaan penyuluh pun dituntut untuk mengejar target demi target dari berbagai sub sektor. Lambat laun, "terasanya" penyuluh ini kurang dipedulikan, loyo seolah kurang vitamin. Ditambah dengan kondisi penyuluh yang kemudian terkotak-kotak, dimana interaksi, komunikasi makin berkurang. Di lain pihak berbagai arah kebijakan masing-masing sub sektor kadang berbeda pula, sehingga perlakuan,

penanganan dan kebijakan kepeduliannya pun pada penyuluh berbeda pula. Kondisi ini yang menyebabkan penyuluh menjadi kurang bersemangat alias loyo itu tadi. Sementara petani nelayan terus berlari, sedang penyuluhnya serupa jalan di tempat alias mandeg! Itu salah satu sebab yang menjadikan kita tak mampu lagi merespon segala aspirasi petani nelayan tersebut.

Kesemuanya itu baginya, merupakan perjalanan "romantika" yang mengesankan dan memperkaya pengalaman kita sebagai penyuluh. *"Gonjang-ganjing" yang terjadi adalah seumpama "dinamika hidup" yang terus bergerak dan membuat kita makin arif"*, begitu ungkapnya berfalsafi. *"Saya menempatkan pekerjaan itu dan seluruh aktivitas hidup ini adalah ibadah semata!"* Dulu ketika dia memulai pekerjaan sebagai penyuluh pun, dia memulainya dengan keraguan yang amat sangat. Dia tidak yakin bahwa pekerjaan yang dia pilih ini adalah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Tetapi kemudian dengan keyakinan seperti tadi, yang menempatkan pekerjaan itu ibadah semata, maka kungkungan keraguan itu pun terdobrah seketika!

Pengalaman mendobrah kungkungan keraguan itu, dimulai dengan menyelami kondisi yang menjadi lingkungan organik dimana dia ditempatkan. PPL itu kantornya di lapangan, tidak seperti pegawai lainnya yang berkantor di gedung, di ruangan dimana orang-orangnya relatif homogen, dan disiplin kerja yang telah dibuat dengan aturan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat

kecamatan. Ada aturannya ada disiplin kerjanya yang telah menjadi nilai normatif di lingkungannya. Tapi bagi PPL, yang dihadapinya adalah lapangan, masyarakat dengan berbagai-bagai kepentingan yang heterogen! Aturan dan disiplin kerjanya pun berbagai pula, sesuai dengan kepentingannya masing-masing! Dia mengungkapkan *"Ini tantangan yang maha sulit yang pertama-tama dihadapi seorang petugas lapangan seperti saya. Pada orang dewasa, betapa sulitnya menyatukan tujuan yang beragam, ke dalam sebuah dinamika gerak yang serasi!"*

Dia berusaha keras belajar pada kondisi kerja demikian, dia bertanya pada senior-seniornya terdahulu. Kemudian dia menemukan bahwa langkah awal seorang penyuluh pertanian lapangan bekerja adalah memahami kondisi lapangannya itu sendiri. Berupaya memahami lapangan yang menjadi lingkungan organik wilayah kerjanya. Terutama harus mampu berbaur dengan masyarakat di mana dia bekerja. Ada pengalaman unik yang dia alami dalam rangka membaurkan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Berbaur dengan masyarakat yang lingkungannya positif dengan kemelekatan pada agama yang begitu kuat, rasanya tak begitu sulit. Ikuti saja segala apa yang menjadi kegiatan mereka, seperti pengajian, syukuran, selamatan dan segala apa kegiatan agama sampai dengan menjadi khotib dapat dia lakukan tanpa beban. Memang untuk melakukan itu semua dia harus rajin belajar dan banyak membuka berbagai buku lagi yang berkaitan dengan kebutuhan yang dihadapinya.

Tetapi manakala harus berbaur dengan masyarakat dengan lingkungan yang negatif (berjudi, mabuk, dan lain-lainnya), disini baru terasa betapa berat tantangannya. Dia merasakan ibarat makan buah simalakama *"dijauhi mereka makin jauh dan segala program tidak sampai, didekati alias berbaur dengan mereka takut kita terseret pada perilaku mereka yang negatif dan berisiko tinggi, serta dapat menghancurkan. Saya tak bisa berdiam diri terus dalam keraguan bertindak, saya harus mendekati mereka, berbaur dengan mereka tanpa harus terseret pada perilaku yang negatif. Bagaimana pun situasinya saya harus sampai pada tujuan yang saya pegang!"*

Syukur, setelah mereka melihat dan merasakan manfaat program-program yang dibawa, akhirnya mereka menjadi malu sendiri, yang kemudian mereka dengan penuh keikhlasan mengikuti segala kegiatan yang direncanakan dan sedikit demi sedikit meninggalkan segala kebiasaan lama yang negatif. Sungguh suatu hal yang sangat melegakan. Penjelajahannya untuk secara intens berbaur dengan mereka, adalah semata-mata hanya ingin lebih memahami tentang mereka. Memahami kebutuhannya, memahami tujuan-tujuannya, memahami orientasinya, memahami aspirasinya. Dengan pemahaman dan pengenalan tersebut, kemudian mengatur strategi bagaimana menghadapi mereka.

Tantangan membangun dinamika dan kepercayaan masyarakat itu, bukan pekerjaan semudah membalikan telapak tangan dan bisa selesai dalam satu kali proses.

Pekerjaan membangun dinamika kelompok itu membutuhkan komitmen moral membangun kepercayaan masyarakat yang dilakukan dengan berulang-ulang, melalui proses pendidikan dengan disiplin kerja yang tersendiri. *"Kadang persoalan teknis ini pun dianggap sepele, orang kadang menduga bila dinamika masyarakat sudah terbangun, maka persoalan teknis menjadi persoalan kecil. Padahal pada kenyataannya tidak begitu, penguasaan penyuluh pada aspek teknis pun akan membangun tingkat kredibilitas yang semakin tinggi"*, demikian tegasnya.

Ada orang bertanya, *"Apa sih pekerjaan penyuluh itu? Apakah sekedar rutinitas saja mengerjakan berbagai pekerjaan, kemudian ditinggal pergi setelah pekerjaan tadi "selesai"?"* Menurutnya *"tidak, pekerjaan penyuluh ini memang luar biasa, dan tidak bisa dikerjakan sembarang orang! Wawasan penyuluh dalam bekerja harus memandang ke depan! Dia harus bisa membayangkan, bahwa apa yang dikerjakannya itu akan menghasilkan keberhasilan tertentu, terutama dalam merubah perilaku orang! Tanpa membayangkan apa yang nantinya akan dihasilkan, maka pekerjaan penyuluh akan tidak jelas, berbagai pekerjaan dikerjakan tanpa tahu apa yang akan dihasilkan. Kalau sudah begitu pekerjaan penyuluh menjadi tidak spesifik lagi. Tidak jelas hasilnya!"*

Memang kadang di tengah iklim bingung ini, dimana atmosfer penyuluhan sedang tidak *oke*, maka kadang tidak jelas lagi mana penyuluh yang bekerja mana penyuluh

yang tidak bekerja. Keduanya sama saja! Kadang idealisme penyuluh terkubur pada situasi kabur yang membelenggunya! Ini sebenarnya tidak perlu terjadi, pada kondisi apa pun seharusnya sebagai penyuluh, dia harus mampu memotivasi dirinya untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri. Bagaimana dia mampu membangun motivasi masyarakat tani yang di luar dirinya tanpa dia sendiri mampu memperbaiki dirinya sendiri!

Ini pernah dia alami ketika, saat sedang kembang-kempis menghadapi berbagai situasi yang menyulitkan diri. Saat itu kondisi penyuluh loyo, bak manusia kurang gizi, di lain pihak perhatian instansi tidak sebaik pada kondisi dulu. Apa yang dia lakukan adalah tetap mengerjakan segala apa yang menjadi tanggungjawab saya. Akan tetapi kemudian sebagai manusia yang berakal, dia terus berupaya menciptakan berbagai kegiatan yang tetap selaras dengan bidang yang digelutinya, serta mendatangkan tambahan penghasilan. Ibaratnya sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui! Jadi ketika itu bila dia berkunjung ke kelompok tani, diapun melakukan juga berbagai usahatani yang selaras dengan kepentingan mereka. Kegiatan tersebut nyatanya membuat dia menjadi lebih rajin, lebih bergairah melakukan kunjungan-kunjungan pada kelompok tani yang ada di wilayahnya.

Bukan itu saja! Kegiatan yang diciptakan dan dibangun dengan kesungguhan hati, nyatanya membuahakan kepercayaan pihak lain! Kegiatannya dilirik pihak lain. Yang

uniknya justru yang memberi kepercayaan itu adalah Kepala wilayah kecamatannya itu sendiri. Beliau memberi kepercayaan untuk menggarap lahan seluas 5 ha untuk dijadikan area ujicoba. Kesempatan itupun tidak disia-siakan, apalagi posisi lahannya cukup strategis. Bersama dengan kelompok tani, dia menyambut kepercayaan itu untuk membangun penerimaan dan kepercayaan orang lain lagi terhadap sosok penyuluh dan kelompok tani yang dibinanya. Sungguh, pengalaman ini mengajarkan padanya, betapa kebesaran Tuhan yang memberi rizki tidak hanya satu sumber saja, tidak hanya dari gaji PNS semata, tetapi sumber-sumber lain yang memberi kepercayaan.

Kepercayaan itu baginya adalah sama saja dengan kehormatan. Dia menegaskan *"hilang kepercayaan orang pada saya, hilang pula segenap harga diri dan seluruh kehormatan saya"*. Tidak mudah membangun kepercayaan orang itu, pada mulanya kebanyakan orang meragukan segala apa yang dia lontarkan. Kondisi itu tidak membuatnya pesimis! Dia berkeyakinan jika ada niat baik, dan semua ada dalam getar resonansi yang sama, maka kita semua pasti dapat bergerak bersama dengan dinamika gerak yang selaras mencerahi, segala apa yang masih gelap! Ada satu pengalaman yang dia sendiri pada awalnya meragukannya untuk mengajak dan berbuat sesuatu secara bersama!

Bayangkan, dia harus membangun motivasi segenap unsur Muspika yang ada di kecamatan. Dia harus mampu mengajak Danramil,

Kapolsek dan seluruh tokoh masyarakat untuk bergerak bersama mengatasi hama tikus! Didasari dengan keyakinan bahwa ini untuk kepentingan bersama, maka dalam suatu forum dia menawarkan sejumlah manfaat, *"jika tikus habis diberantas, produksi pangan melimpah, masyarakat tidak resah, PBB yang lunas, Pajak-pajak lain yang menjadi kewajiban warga akan terpenuhi, dan tumbuhnya gairah kerjasama dan swadaya masyarakat"*, maka tanpa diskusi panjang Muspika setuju dengan bulat. Dan kegiatan pun berjalan seperti apa yang direncanakan.

Pada hematnya, profesionalisme penyuluh, kualitasnya justru ada pada kemampuan "berempati" dan membaurkan diri dengan berbagai kondisi yang menjadi lingkungan organiknya! Dia tidak setuju, bahwa keahlian penyuluh adalah identik dengan tingkat pendidikan formal semata! *"Tidak bisa begitu, bagi penyuluh pendidikan non formal pun yang berlandaskan pada kedalaman pengalaman harusnya mengiringi kemampuan pendidikan formal yang menunjukkan dia ahli di bidangnya dan di wilayah kerjanya itu sendiri. Sebab tanpa pengalaman dan pemahaman pada wilayah kerjanya seorang penyuluh dengan pendidikan S1, bahkan S3 pun akan tampak "bloon" ketika berhadapan di wilayah kerja yang tidak dikenalnya dengan baik"*. Begitu tegasnya.

Ada tiga hal yang harus dikenali oleh seseorang pada kapasitas sebagai penyuluh pertanian. Yang pertama dia harus memahami aspirasi petani nelayan, yang kedua dia harus memahami kondisi wila-

yah dimana dia bekerja, dan yang ketiga dia pun harus memahami program-program pembangunan pertanian di wilayah kerjanya. Pada aspek ketiga itulah penyuluh pun harus lengket dengan berbagai program-program pembangunan pertanian yang akan dilakukan di wilayahnya. *"Saya berkeyakinan apa pun program yang akan dihantarkan kepada masyarakat, ujung-ujungnya tentu membutuhkan intervensi tindakan persuasi edukasi, yang menjadi pekerjaan spesifik seorang penyuluh pertanian"*.

Pengalamannya berinteraksi dengan program Diversifikasi Pangan dan Gizi serta Proyek P4K, menunjukkan bahwa pekerjaan penyuluh pertanian pada kedua program tersebut ternyata memberikan kontribusi yang tidak sedikit. Apalagi proyek P4K yang menjanjikan pendidikan sebagai metodenya dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Disitu penyuluh pertanian yang terlibat dituntut profesionalismenya sebagai penyuluh pertanian yang handal. Penyuluh yang tidak mampu membaurkan diri pada program ataupun proyek yang ada di wilayahnya, adalah seumpama idealisme yang mati perlahan tanpa kubur!

Ketika ditanya hasil kinerjanya selama belasan tahun menggeluti dunia penyuluhan pertanian - Djoko cukup menjawab sambil tersenyum *"Itu kan bukan kerja penyuluh semata, di dalamnya ada kerjasama berbagai pihak yang memberikan kontribusinya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing"*. Dia merasa puas bahwa dari sejumlah kelompok tani yang menjadi mitra-

nya sebagian ada yang menjadi juara nasional, ada yang menggelar pameran di Senayan Jakarta, ada yang pergi ke Thailand, ada yang dibawah garis kemiskinan kini telah beranjak menjadi lebih baik. Tetapi yang lebih memberi kepuasan pada dirinya selain kejuaraan-kejuaraan yang bersifat formal yang kadang membanggakannya, adalah manakala dia berjalan melintas ke daerah yang dulu menjadi wilayah kerjanya, *"disitu terlihat hasil kerjanya, disitu terlihat perubahan perilaku petani dengan keserempakan pola tanamnya yang terorganisir rapi dan indah. Lebih-lebih lagi ketika dia menyempatkan diri mengunjungi salah satu kelompoknya, penerimaan mereka kelompok tani yang begitu tulus adalah kepuasan kerja yang sulit diukur!"* demikian ungkapnya.

Ketika ditanya kembali tentang SKB Mendagri dan Mentan tentang penyelenggaraan penyuluhan pertanian di negeri tercinta ini, maka ayah dua anak putri yang pernah menjabat sebagai ketua koperasi di Kecamatan Batang ini berkomentar arif - SKB 1996 memang seumpama angin yang menyejukan, harapan saya moga -moga SKB baru ini tidak hanya memikirkan penyuluh sebagai ujung tombak semata, tetapi minimal penyuluh pun punya akses dan kontrol pada landean tombak dan sekaligus pada tangan-tangan yang menggerakkan landean dan ujung tombak itu. Sebab tangan (orang) dan tombak (landean dan ujungnya) adalah satu kesatuan utuh yang harusnya bersenyawa dan digerakkan serta diarahkan pada sasaran yang tepat!"

andi sumarga

KONGRES PERHIPTANI III, DUDUNG A. ADJID KEMBALI MENJADI KETUA

Sejak berdiri pada tanggal 6 Juli 1987, Perhiptani telah memancang tonggak sebagai organisasi profesi yang bersifat keilmuan, persaudaraan, kemasyarakatan yang tidak berafiliasi dengan organisasi politik, dalam mengembangkan ilmu penyuluhan pertanian dan penerapannya bagi pengembangan pertanian progresif.

Dalam usianya yang ke 9, kiprah Perhiptani sudah mampu menunjukkan jati diri sebagai organisasi profesi yang memiliki visi dan misi jauh ke depan untuk mewujudkan sistem penyuluhan pertanian dan ilmu penyuluhan pertanian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Berkenaan dengan idealisme dan tantangan yang harus dijawab oleh Perhiptani dalam mengembangkan penyuluhan pertanian yang progresif, maka kongres ke 3 (tiga) Perhiptani yang diikuti dengan kegiatan simposium, digelar dengan tema *"Revitalisasi Penyuluhan Pertanian dalam Pengembangan Kemitraan Agribisnis Hortikultura menyongsong Era Globalisasi"*.

Kongres yang berlangsung pada tanggal 15 Juli 1996 di Mataram ini bertujuan untuk menyusun Pengurus Perhiptani Pusat masa bakti 1996-2001, menunjukkan peran organisasi Perhiptani sebagai ajang meningkatkan profesionalisme & intelektual





anggota serta menjalin hubungan langsung atau tidak langsung dengan organisasi profesi sejenis.

Hasil kongres yang dihadiri oleh DPD Perhiptani dari 27 Provinsi, Pengurus Pusat dan Peninjau adalah tersusunnya Pengurus Pusat Perhiptani periode 1996-2001 yang kembali diketuai oleh Dudung A. Adjid dengan Sekjen A. Soedradjat Martaamidjaja.

Selain susunan Pengurus Pusat Perhiptani, kongres juga berhasil menetapkan Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga Perhiptani 1996-2001, Kode Etik Penyuluhan Pertanian serta Deklarasi Mataram.

Menilik dari hasil kongres Perhiptani, maka untuk masa yang akan datang kiprah Perhiptani akan semakin dituntut kinerjanya dan sebagai organisasi profesi maka wujud dari segala bentuk kegiatan yang dimunculkan oleh Perhiptani adalah dengan semakin handalnya para penyuluh pertanian dalam menghadapi dinamika perubahan pembangunan.

rm. chadirsyah

KODE ETIK PENYULUHAN PERTANIAN

MUKADIMAH

Seorang Penyuluh Pertanian pada dasarnya adalah aparat yang membangun pertanian, pendidik/penasehat yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan para petani-nelayan beserta keluarganya. Pekerjaan seorang Penyuluh Pertanian tidak terbatas pada mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan, tetapi juga, bahkan terutama, untuk memotivasi, membimbing dan mendorong para petani-nelayan mengembangkan swadaya dan kemandiriannya dalam berusahatani yang lebih menguntungkan menuju hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Dengan demikian Penyuluh Pertanian adalah seorang agen pembangunan pertanian dan mitra petani-nelayan beserta keluarganya.

Di dalam melaksanakan tugasnya, Penyuluh Pertanian sebagai seorang agen pembangunan di bidang pertanian, akan senantiasa dihadapkan kepada tanggungjawab berlangsungnya perubahan-perubahan yang menyangkut perilaku, perikehidupan dan nasib para petani-nelayan yang dilayaninya. Tanggungjawab tersebut bukanlah hal yang ringan dan mudah dilakukan di mana Penyuluh Pertanian dituntut bukan saja memiliki kecakapan dan keahlian yang memadai, tetapi juga dedikasi, pengabdian yang tinggi dan moral luhur. Dari seorang Penyuluh Pertanian dituntut integritas profesi yang kuat dilandasi oleh keyakinan yang lebih tangguh dalam membantu petani-nelayan menolong dirinya sendiri memperbaiki nasib dan derajat hidup ke arah yang lebih tinggi.

Mengingat beratnya tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan profesinya, Penyuluh Pertanian dituntut untuk berbuat dan berperilaku sebaik-baiknya sesuai dengan martabat profesinya, sehingga apapun yang dilakukan tidak akan merugikan petani-nelayan yang dilayaninya serta tidak menodai citra profesi Penyuluh Pertanian.

Untuk itu, diperlukan sebuah kode etik yang dapat dipakai sebagai acuan perilaku profesi bagi setiap Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini diberi nama PANCA ETIKA PENYULUH PERTANIAN.

PANCA ETIKA PENYULUH PERTANIAN

1. Penyuluh Pertanian beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta senantiasa menghormati dan memperlakukan petani-nelayan beserta keluarganya sederajat dengan dirinya.
2. Penyuluh Pertanian senantiasa menempatkan keinginan dan kebutuhan petani-nelayan sebagai dasar utama pertimbangan dalam mengembangkan program apapun bersama petani-nelayan beserta keluarganya.
3. Penyuluh Pertanian senantiasa lugas, tulus dan jujur dalam menyampaikan informasi, saran ataupun rekomendasi dan bertindak sebagai motivator, dinamisator, fasilitator serta katalisator dalam membimbing petani-nelayan beserta keluarganya.
4. Penyuluh Pertanian senantiasa memiliki dedikasi dan pengabdian untuk membela kepentingan petani-nelayan atas dasar kebenaran serta dalam melaksanakan tugas senantiasa memperlihatkan perilaku teladan, serasi, selaras dan seimbang kepada semua pihak.
5. Penyuluh Pertanian senantiasa memelihara kesetiakawanan dan citra korps Penyuluh Pertanian atas prinsip "silih asuh - silih asih dan silih asah" serta senantiasa bersikap dan bertingkah laku yang menghormati agama, kepercayaan, aturan, norma dan adat istiadat setempat.

DEKLARASI MATARAM

KAMI PARA PENYELENGGARA PENYULUHAN PERTANIAN MENYADARI DAN MEYAKINI BAHWA :

1. Pembangunan pertanian adalah pembangunan sumberdaya manusia petani dan masyarakat pedesaan untuk menjadi petani dan masyarakat pembangun yang memiliki keunggulan dalam : semangat, wawasan, kecerdasan, keterampilan, iptek, organisasi, manajemen, kepemimpinan, permodalan, keterkaitan, informasi dan posisi;
2. Penampilan perilaku dan kinerja membangun dari petani dan masyarakat pedesaan adalah hasil dari proses "belajar dengan bekerja" yang sistematis, berkelanjutan dan berprogram dalam sistem interaksi yang akrab antara petani selaku subjek dengan aparatur penyuluhan pertanian serta didukung oleh aparatur lain yang terkait;
3. Dayaguna, kelancaran dan keberlanjutan dari proses "belajar dengan bekerja" itu ditentukan oleh ketepatan-gunaan dan kesesuaian dari falsafah, wawasan, kebijakan strategi, metodologi, substansi dan profesionalisme dari aparatur penyuluhan pertanian;
4. Aparatur yang aktif menyelenggarakan kegiatan dan program penyuluhan pertanian adalah Aparatur Pemerintah, Badan Usaha (Negara, Swasta) dan LSM, atau perorangan yang berkepentingan dengan pembangunan/pedesaan dengan berbagai aspeknya seperti kewilayahan, pemerintahan, kependudukan, lingkungan hidup, ekonomi, koperasi, industri dan lain-lain yang eksistensinya terkait dengan keberadaan sektor primer pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

BERSEPAKAT DAN BERIKRAR UNTUK SELALU :

1. Mengabdikan profesi kami sebagai pendidik, penyuluh dan pendamping petani dan keluarganya serta masyarakat pedesaan dengan menempatkan petani dan keluarganya sebagai subjek, pelaku usahatani dan pengambil keputusan yang mandiri dan bertanggungjawab;
2. Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan profesional kami dalam menghadapi berbagai tantangan, hambatan dan kendala yang timbul dari dinamika perubahan lingkungan lokal, wilayah, nasional, regional maupun global, agar dapat mengembangkan kemampuan petani dan masyarakat pedesaan menjadi pelaku sistem agribisnis yang dinamik, maju, efisien, menguntungkan, kompetitif dan tangguh;
3. Menggalang dan memperkuat kesetiakawanan profesi dan jiwa korsa penyuluh pertanian dalam wadah PERHIPTANI;
4. Mengambil hikmah dari posisi kami sebagai "ujung tombak" organisasi tempat kami bekerja untuk memberi manfaat dan dayaguna sebaik-baiknya bagi kecerdasan, kemandirian, ketangguhan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya;
5. Memadukan dan menyerasikan berbagai sumberdaya, iptek, fasilitas dan kepakaran untuk melayani kebutuhan dan kepentingan spesifik suatu sistem agribisnis pada suatu lokalita tertentu;
6. Bekerja dan bermitra dengan semua dan berbagai profesi yang terkait dengan dan dibutuhkan oleh sistem agribisnis dan agroindustri;
7. Menghimbau semua pihak yang berkepentingan untuk berperan-serta dan membantu kelancaran terwujudnya Deklarasi Mataram ini.

MATARAM, 15 JULI 1996

PENYELENGGARA PENYULUHAN PERTANIAN

PEKAN TANI ASEAN VI DI THAILAND

Acara Pekan Tani ASEAN (ASEAN Farmer's Week), telah beberapa kali dilaksanakan secara bergantian oleh negara-negara anggota ASEAN, untuk Pekan Tani ASEAN VI diselenggarakan di Thailand dengan peserta dari 5 negara yaitu Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Seharusnya ada 7 negara ASEAN yang hadir dalam acara tersebut, namun sampai dengan acara berlangsung, Philippina dan Singapura tidak dapat berpartisipasi dalam acara tersebut.

Tujuan dilaksanakannya Pekan Tani ASEAN antara lain adalah :

1. Menjalin hubungan persaudaraan antara sesama petani-nelayan dari negara-negara regional ASEAN;
2. Meningkatkan pengetahuan peserta melalui studi banding berbagai aktivitas usahatani untuk mendukung pembangunan pertanian dikawasan ASEAN;
3. Terjalannya hubungan kerjasama perdagangan dan alih teknologi di bidang pertanian yang saling menguntungkan diantara petani-nelayan ASEAN untuk menunjang AFTA (*ASEAN Free Trade Area*);
4. Memperkenalkan potensi dan kemajuan pembangunan pertanian yang telah dicapai negara tuan rumah kepada delegasi negara-negara ASEAN lainnya.

Pekan Tani ASEAN VI dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 19 Mei 1996 dengan sebagian besar kegiatannya dilaksanakan di provinsi Rayong (bagian timur Thailand) dan Bangkok.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Pekan Tani ASEAN VI ini antara lain Kunjungan Kehormatan ke Gubernur Provinsi Rayong, menghadiri "*The Royal Ploughing Ceremony*" sebuah acara ritual awal tanam yang dihadiri oleh Raja dan Ratu Thailand beserta keluarganya,



Seluruh Anggota Delegasi pada Acara Pembukaan



*Kunjungan Lapangan
ke Perkebunan
"UNCLE SOON
RAYON"*

kunjungan lapangan ke Perkebunan Suphattra Land, menghadiri Seminar Nasional Tahunan Ketua Kelompok Tani Seluruh Thailand serta Seminar Antar Delegasi Peserta Pekan Tani ASEAN yang mengkaji kerangka kerjasama dan alih teknologi bagi para petani-nelayan di kawasan ASEAN.

Delegasi Indonesia terdiri dari 6 orang, seorang wakil dari Pusat Penyuluhan Pertanian yaitu *Hari Susanto* dan 5 orang KTNA yaitu *Winarno Tohir, Henny Mappatangka, Kadir Rasyidi, I Wayan Teler* dan *Hari Kadariyanto* mengikuti acara dengan aktif dan bersemangat sehingga mempercepat terjalinnya keakraban dan kekeluargaan diantara sesama anggota delegasi.

Pekan Tani ASEAN VI di Thailand ini menghasilkan beberapa

rekomendasi untuk ditindak-lanjuti oleh masing-masing negara anggota delegasi diantaranya :

- ♦ Setiap negara peserta Pekan Tani ASEAN diharapkan untuk lebih memperkenalkan pembangunan pertanian serta organisasi petani negaranya masing-masing.
- ♦ Negara-negara ASEAN diharapkan mempersiapkan diri dengan meningkatkan kualitas dan pengawasan terhadap kualitas produk-produk pertanian dalam menghadapi AFTA di tahun 2003.

Kesepakatan lain yang dihasilkan dalam Pekan Tani ASEAN VI di Thailand adalah menentukan Malaysia sebagai tuan rumah Pekan Tani ASEAN berikutnya di tahun 1997.

Hari Susanto

Kiat

Memilih Permainan yang Tepat

Salah satu pekerjaan penyuluh pertanian adalah menghadapi petani-nelayan yang menjadi sasarannya, pada saat memberikan kursus atau pertemuan-pertemuan lainnya. Agar materi yang disampaikan dapat diterima dan mengena seringkali penyuluh menyampaikannya melalui permainan-permainan berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih permainan yang tepat diantaranya:

- a. Tujuan permainan yang baik adalah permainan yang mampu menggiring peserta ke arah tujuan penyampaian materi pilih permainan yang tepat dan sesuai dengan tujuan materi yang akan dicapai.
- b. Jumlah peserta, upayakan setiap peserta dapat terlibat dalam permainan bila yang bermain beberapa, yang lainnya tugaskan sebagai pengamat.
- c. Umur peserta.
- d. Bahan yang diperlukan untuk permainan.
- e. Tempat berlatih.
- f. Waktu, apakah waktu yang tersedia cukup untuk latihan/permainan yang dipilih.
- g. Situasi kelompok, bila peserta sudah mulai letih jangan pilih permainan yang lebih melelahkan mereka cari permainan yang menyegarkan, cermati kesukaan dan ketidak-sukaan anggota kelompok untuk bisa mencari berbagai adaptasi permainan.
- h. Pengalaman fasilitator, yakinkan bahwa kita siap untuk memimpin permainan tersebut, jangan sampai terjadi kesalahan yang menurunkan kredibilitas kita.

Menyampaikan materi dengan bumbu permainan memang cukup menyenangkan dan sangat efektif, supaya benar-benar berhasil, siapkan beberapa alternatif permainan yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta.

Akhirnya, keberhasilan dalam penyampaian materi melalui permainan ini sangat tergantung dari diri penyuluh itu sendiri.

Jadilah diri anda sendiri dan tidak perlu memaksa agar tidak terasa penampilan anda dibuat-buat. (rm)

Sumber : Proses Pengembangan Diri 1993, Cremer dan Siregar

Pokok Pikiran tentang Pembinaan Kelompok Tani

Ketentuan pembinaan kelompok tani-nelayan melalui beberapa SK Mentan adalah untuk memudahkan administrasi, keseragaman pembinaan terutama bagi para penyuluh pertanian yang sebetulnya bagi petani sendiri tidak memusingkannya.

Pokok pikiran saya tentang pembinaan kelompok tani-nelayan seperti pada SK Mentan No. 881 Tahun 1988 dengan beberapa catatan:

- a. Disesuaikan dengan reorientasi tujuan pembangunan pertanian yakni pengembangan wilayah yang berorientasi agribisnis
- b. Jumlah anggota kelompok tani-nelayan disesuaikan dengan kondisi wilayah tidak mesti 20-30 orang anggota ; misalnya di Irian Jaya satu kampung yang letaknya terpencar dan terpencil hanya berpenduduk 10 keluarga maka bapak-bapaknya itulah bisa dijadikan satu kelompok.
- c. Pembinaan kelompok tani disamping hampan juga tidak mengesampingkan domisili, sedangkan kegiatan, jenis (dewasa, wanita, taruna dll.) merupakan "sub kelompok".
- d. Penilaian Kemampuan Kelompok Tani-Nelayan melalui 5 jurus, indikatornya perlu ditelaah kembali sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam menentukan kelas kemampuan kelompok berdasarkan indikator-indikator yang disusun oleh masing-masing sub sektor.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka diperlukan adanya penyempurnaan terhadap pedoman pembinaan kelompok tani-nelayan yang telah ada yang mengakomodasikan perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian terlebih setelah terbitnya SKB Mendagri-Mentan tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Ir. Puspoyo

Penyuluh Pertanian Provinsi Irian Jaya

Kita berceloteh tentang opini, harapan, kondisi faktual, komentar terhadap kiprah penyuluhan pertanian baik itu yang terjadi di lapangan maupun hal-hal lain yang kiranya perlu untuk diketahui oleh pembaca *ekstensia*, *ekstensia* menerima celoteh para pembaca untuk dapat dimuat dalam rubrik CELOTEH.

Tulisan bersifat ringkas dan dikirimkan ke *ekstensia* dengan dilengkapi identitas penulis (foto copy KTP/SIM/Karpeg dll). *ekstensia* akan memuat tulisan yang lengkap dan berwenang untuk memutuskan tulisan yang akan dimuat.

Tantangan Baru Bagi KTNA

Mendengar terbitnya SKB Mentan- Mendagri, bagi kami para KTNA seakan merupakan angin segar karena penyuluhan kembali diperhatikan setelah sekian lama ada dalam kondisi lesu terutama dengan keberadaan BPP nya.

Namun demikian kehadiran SKB ini menurut saya justru merupakan tugas berat bagi KTNA untuk membuktikan kemampuannya karena jelas dituliskan dalam salah satu pasal bahwa nantinya pengelolaan BPP menjadi tanggung jawab kelompok tani-nelayan, walaupun secara kenyataan sekarang ini masih sulit untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

Langkah penting yang harus ditempuh untuk mempersiapkan kemampuan kelompok tani-nelayan dalam mengelola BPP adalah dengan dilaksanakannya "Gerakan Pembenahan Kelompok Tani-Nelayan" karena sekarang ini banyak sekali kelompok yang cuma ada namanya saja tapi tidak jelas kegiatannya, kalau kondisi ini terus berlangsung maka apa yang ditulis dalam SKB itu hanya sekedar impian saja tanpa pernah terwujud.

Saya menantang kepada Rembug Harian KTNA di setiap wilayah untuk mulai merancang "Gerakan Pembenahan Kelompok Tani-Nelayan" dan menunjukkan kiprahnya dalam mewujudkan pengelolaan BPP dari petani dan untuk petani,

sehingga apabila ini bisa terwujud maka hapuslah segala keraguan bahwa kelompok tani cuma pelaksana saja dari berbagai program tapi mampu menciptakan program yang muncul dari keinginan dan potensi petani itu sendiri.

Karena ini merupakan cita-cita luhur yang menempatkan petani sebagai pengambil keputusan maka sudah selayaknya SKB ini juga dimasyarakatkan kepada para KTNA agar kami tidak lagi jadi penonton, apalagi sekarang jaman-nya serba partisipatif jangan sampai terjadi kami hanya diatasnamakan saja dengan kalimat-kalimat indah tanpa kami tahu apa maknanya.

Bagi bapak dan ibu penyuluh, siapkan senjata dan staminanya agar kita bisa seiring sejalan menghadapi tantangan untuk mewujudkan cita-cita ini, tentu saja peluru-peluru serta jurus-jurus yang jitu harus menjadi bekal bapak dan ibu penyuluh yang mestinya tanpa harus dipusingkan lagi dengan uang jalan yang tersendat-sendat.

Selamat buat PUSLUHTAN, maju terus kami tunggu langkah-langkahnya dalam merealisasikan segala apa yang termaksud dalam SKB tersebut.

H. Sofwan Hidayat

KTNA Kabupaten Indramayu
Anjatan Utara RT 01/RW 05
Kec. Anjatan, Kab. Indramayu

Ronny Adhikarya, Ph.D.

STRATEGIC EXTENSION CAMPAIGN

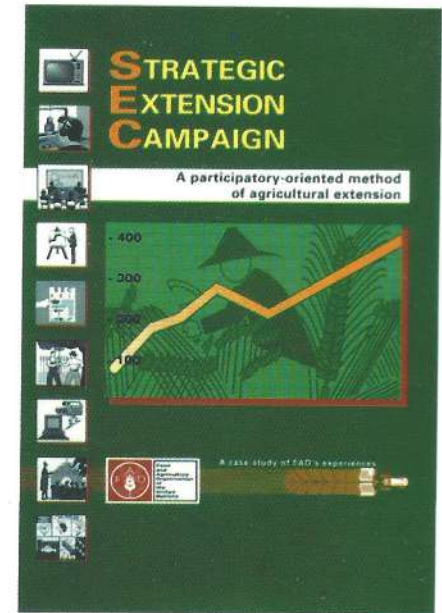
A Participatory Oriented Method of Agricultural Extension

FAO, 1994

Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan sangat tergantung dari pengembangan dan penerapan metoda yang tepat. Seringkali dijumpai keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan hasil proses kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan secara optimal berbagai potensi sumberdaya yang ada.

Metode Penyuluhan Pertanian berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu mengikuti dinamika petani-nelayan baik itu metode yang dirancang secara umum berlaku pada setiap kondisi petani-nelayan ataupun metode yang dikembangkan secara spesifik untuk kondisi petani-nelayan tertentu.

Buku *Strategic Extension Campaign: A Participatory-Oriented Method of Agricultural Extension* memberikan gambaran mengenai pengalaman FAO dalam mengembangkan dan menerapkan metode



penyuluhan dengan menempatkan pendekatan partisipatif sebagai titik sentral strateginya baik secara konseptual maupun aspek praktis pelaksanaannya di lapangan.

Partisipasi masyarakat merupakan konsep dasar yang diangkat oleh penulis untuk mengembangkan metode *Strategic Extension Campaign (SEC)* dengan titik awal survey terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap petani yang hasilnya digunakan sebagai dasar dalam pengembangan strategi perencanaan penyuluhan, pelatihan bagi penyuluh, petani dan petugas pendukung serta pengembangan multi media yang digunakan dalam penyuluhan pertanian.

Buku setebal 209 halaman ini terbagi dalam 5 bagian, bagian pertama menjelaskan mengenai **Apa dan mengapa serta kegunaan SEC**, bagian kedua mengenai **Proses dan Konteks SEC, Penerapan Metodologi SEC** pada bagian ketiga,

Keberhasilan Program SEC di beberapa negara pada bagian ke empat serta bagian ke lima mengenai **Kegunaan SEC** dalam meningkatkan sistem dan program penyuluhan.

Bagian pertama dari buku ini membahas *Apa dan Mengapa* serta kegunaan metode ini. Dalam penjelasannya penulis menyebutkan 9 kegunaan yang dapat dipetik dengan penerapan metode *Strategic Extension Campaign (SEC)* yaitu :

- (1) Mengembangkan Pendekatan Perencanaan Partisipatif (*Participatory Planning Approach*), dengan prinsip "*Start with what people already know and build on what they already have*".
- (2) Mengorientasikan Kepada Kebutuhan dan Keinginan Sasaran
- (3) Menerapkan Perencanaan Strategis dan Pendekatan Sistem secara Terpadu
- (4) Berdimensi Perilaku Manusia, menempatkan kepentingan dan pengertian perilaku manusia sebagai faktor yang menentukan adopsi terhadap suatu inovasi.
- (5) Berorientasi Pemecahan Masalah, berdasarkan kondisi permasalahan secara spesifik .
- (6) Menerapkan Pendekatan Penggunaan Multi Media, yang merupakan kombinasi pendekatan komunikasi perorangan, kelompok dan massa dengan menekankan pada tingkat efektivitas dan efisiensi dengan spektrum sasaran terpilih.
- (7) Meningkatkan Pendukung Penyuluhan secara Spesifik melalui penyiapan materi dan pelatihan.
- (8) Proses dan Evaluasi yang terdokumentasikan, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.
- (9) Dapat digunakan untuk program-program penyuluhan lainnya secara fleksibel.

Bagian ke dua dari buku ini menjelaskan mengenai *Proses dan Konteks Metode SEC*, disini penulis mendefinisikan Metode SEC sebagai strategi perencanaan penyuluhan yang berorientasi pemecahan masalah secara partisipatif yang dilaksanakan dalam waktu relatif singkat untuk meningkatkan pengetahuan/kesadaran sasaran dengan perubahan perilaku dalam mengadopsi ide atau teknologi melalui penggunaan desain pesan spesifik, multi media yang efektif untuk pendukung informasi, pendidikan/pelatihan serta kegiatan intervensi komunikasi lainnya.

Pada bagian ini Proses Pengembangan Rencana Strategi Penyuluhan disusun ke dalam 2 bagian. Bagian pertama adalah Proses Perencanaan Pengembangan Strategi, dan bagian ke dua mengenai Proses Perencanaan Manajemen.

Proses Perencanaan Pengembangan Strategi terdiri dari 5 fase kegiatan yaitu:

- (1) Identifikasi Masalah dan Teknologi yang dibutuhkan
- (2) Perumusan Tujuan
- (3) Penetapan Strategi Pengembangan dan Strategi Informasi
- (4) Analisa Sasaran dan Segmentasi Sasaran
- (5) Pemilihan Multi Media
- (6) Pengembangan Desain Pesan, Pretesting dan Produksi Materi

Proses Perencanaan Manajemen terdiri dari 4 fase kegiatan yaitu:

- (1) Perencanaan Manajemen
- (2) Pelatihan Petugas
- (3) Penerapan Metode di lapangan
- (4) Dokumentasi Proses dan Evaluasi Sumatif

Baik Proses Perencanaan Pengembangan Strategi maupun Perencanaan Manajemen memerlukan Sistem Informasi Manajemen yang dapat menjamin perencanaan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat sehingga perencana dapat mengambil keputusan yang terbaik.

Satu demi satu tahapan dijelaskan dalam buku ini dengan cukup rinci berikut contoh penerapannya pada berbagai proyek FAO di berbagai negara, sehingga dengan demikian pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang maksud dan output akhir dari setiap tahapan.

Penerapan metode SEC, dijelaskan pada bagian ke tiga yang menggambarkan aspek-aspek implementasi metode SEC di lapangan serta hal-hal yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pendukung terhadap keberhasilan penerapan metode tersebut.

Penerapan SEC sebagai metodologi dimulai pada tahun 1979 di Bangladesh, setelah keberhasilannya dirasakan dalam beberapa program maka metode ini juga dikembangkan di berbagai negara diantaranya, Malaysia, Zambia dan lain-lain.

Berdasarkan pengalaman penerapan metode SEC tersebut di berbagai negara, penulis mengungkapkan bahwa keberhasilan penerapan metode ini sangat

tergantung dari tingkat integrasi diantara kegiatan proyek dengan program yang diselenggarakan oleh lembaga penyuluhan pertanian dengan mengikuti setiap tahapan pelaksanaannya secara taat asas.

Bagian ke empat adalah bagian yang menampilkan berbagai *hasil penerapan metode SEC* di berbagai negara, diawali dengan Kampanye Pengendalian Tikus di Bangladesh, kampanye dengan hal yang sama di Malaysia, kegiatan kampanye di Thailand, Zambia dan lain-lain.

Penjelasan pada bagian ke empat ini juga dilengkapi dengan berbagai data dan gambar-gambar yang memberikan gambaran bagaimana metode ini diterapkan di masing-masing negara secara spesifik.

Bagian terakhir menyajikan *implikasi penggunaan metode SEC* dalam lingkup yang lebih luas yaitu dalam meningkatkan sistem penyuluhan pertanian, program dan kegiatan penyuluhan pertanian untuk lebih efektif dan efisien lagi.

Di akhir tulisannya penulis menyimpulkan prinsip-prinsip penting agar SEC ini dapat secara efektif meningkatkan dan memperkuat sistem dan program penyuluhan pertanian diantaranya :

- Identifikasi masalah dan analisa kebutuhan harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif misalnya melalui baseline survey tentang pengetahuan, keterampilan & sikap petani, ataupun melalui *Focus Group Interviews (FGI)*.
- Tujuan penyuluhan harus spesifik, terukur, berorientasi pemecahan masalah, merefleksikan

tingkat pengetahuan, sikap, perilaku yang berubah serta berdasarkan kebutuhan sasaran.

- Program penyuluhan harus direncanakan, diimplementasikan serta dikelola secara multi disiplin dengan melibatkan peneliti, penyuluh, pelatih, pendukung komunikasi dan pihak-pihak yang terlibat lainnya.
- Program penyuluhan bukan hanya menyalurkan hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan tetapi harus mampu memberikan umpan balik kepada hal-hal apa yang secara faktual diperlukan oleh petani untuk diteliti.
- Strategi penggunaan multimedia untuk menjangkau segmentasi sasaran tertentu harus mempertimbangkan tujuan penyuluhan serta hasil yang diharapkan melalui kegiatan tersebut.

Buku terbitan FAO pada tahun 1994 ini, menarik untuk disimak sebagai penambah wawasan terhadap metode penyuluhan pertanian. Pada dasarnya memang metode ini bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi dalam buku ini penulis sedemikian rupa memberikan penjelasan tahapan demi tahapan metode SEC secara rinci sehingga pembaca dapat memahami alasan-alasan yang

digunakan penulis mengapa suatu tahapan perlu dilaksanakan.

Keyakinan pembacapun terhadap kehandalan metode ini digiring oleh penulis dengan menggelarkan pengalaman penerapan metode tersebut di berbagai negara lengkap dengan data, foto dan gambar-gambar.

Hanya sayang, dalam buku ini penulis sedikit sekali memberi porsi terhadap kelemahan atau kekurangan dari metode SEC tersebut, padahal sebagai satu metode yang ditawarkan sudah selayaknya ditelaah dalam dua sisi dengan porsi yang sama.

Untuk ukuran Indonesia, teorinya mungkin sudah tidak asing lagi, dengan penerapannya secara parsial yang dilakukan pada beberapa program. Barangkali program SL-PHT dapat dijadikan contoh penerapan metode ini dengan modifikasi disana-sini.

Dalam mengisi era Revitalisasi Penyuluhan Pertanian kiranya metode ini perlu diperkenalkan kepada para penyuluh pertanian dan bisa saja penerapan metode ini dilakukan oleh BIPP sebagai "test case" bagi para penyuluh untuk mengembangkan metode penyuluhan pertanian dengan wawasan yang agak berbeda.

ranny mutiara

ekstensia menerima resensi buku yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian, pengembangan masyarakat dan dinamika sosial yang ditulis pembaca untuk dimuat dalam rubrik WACANA.

Tulisan diketik dalam 2 spasi maksimal 3 halaman A 4/kwarto (dengan mesin tik biasa atau elektrik) atau diketik menggunakan berbagai program pengolah kata (MS Word, WP, WS dsb.) dan dikirimkan ke ekstensia dalam disket atau *print out*-nya.

ekstensia akan menentukan tulisan yang akan dimuat dan bagi yang tidak dimuat naskah akan dikirimkan kembali



Ambisi Majudi

"Tidak ada lagi eyang, hanya jantung dibalik dada burung itu!" jawab Harjuna, justru sambil memejamkan matanya.

"Lepaskan, panahmu, Harjuna!" perintah sang begawan dengan penuh antusias, maka melesatlah panah sang ksatria, dan tak pelak lagi tepat menembus jantung burung yang sedang terbang membelah cakrawala. Kemudian jatuh dengan darah merah yang membasahi tanah!

Itulah ilmu memanah, sang ksatria pilih tanding yang tak terkalahkan. Penerapan ilmu yang begitu dahsyat, hingga bisa mengabaikan alam sekelilingnya, mata dan hatinya hanya tertuju, hanya terpusat pada sasaran bidiknya semata, jantung burung itu!

Dan senja itu, Majudi begitu larut, begitu melekat pada ambisi pribadinya, seperti Harjuna tetapi dalam penerapan yang salah. Majudi juga mengabaikan alam sekelilingnya. Padahal sore itu alam begitu indah, langit memerah diselengi warna biru kehijauan serta garis-garis cahaya yang menembus di sela-selanya. Burung-burung beterbangan bergerombol pulang ke arah cahaya, lain halnya dengan kele-

Apa yang kau lihat, Harjuna? bertanya sang Begawan Dorna, maha guru ilmu memanah pada murid terkasihnya Raden Harjuna, ksatria maha tampan, panengah pandawa lima! Ketika itu tengah di gelar pameran ilmu memanah oleh Keluarga Istana, dan Harjuna sedang membidik seekor burung yang terbang melesat, di keluasan cakrawala.

"Burung yang terbang itu, eyang!" jawab Harjuna!

"Apa lagi yang kau lihat, raden?" lanjut sang begawan!

"Hanya burung itu, eyang!"

"Apalagi, raden?"

"Dada burung!" jawab Harjuna

"Apalagi?" tanya sang begawan tak sabar

lawar yang terbang satu-satu, justru menjauhi berkas-berkas cahaya.

Sesungguhnya panorama senja yang demikian, akan membuat siapapun diam tak beranjak dan tak pernah ingin meninggalkan barang sekejappun keindahan yang luar biasa tersebut ! Tapi lain dengan Majudi, yang bersepeda melintas di keluasan cakrawala justru seolah tak acuh, mengabaikan alam indah sekelilingnya.

Majudi terus saja mengayuh sepeda ! roda-roda sepeda yang berputar-putar, seolah putaran alam pikiran Majudi yang tak henti bekerja. Siang tadi baru saja dia membaca **Sinar Tani** berita mengenai SKB Mendagri dan Mentan, - **SKB, SKB!** - begitu terus menerus pikirnya, dan seperti bidikan Harjuna yang makin terpusat, maka putaran alam pikiran Majudipun makin terpusat, - **dari SKB, menyempit ke BIPP, dari BIPP makin tajam lagi jadi Kepala BIPP. Dan dari Kepala BIPP, tidakkah identik dengan dirinya, pada kapasitas sebagai penyuluh ?** - begitu yang ada dalam pikirannya, tidak ada pikiran yang lainnya. Padahal di goncengan sepeda tuanya, Inten membisu duduk terdiam ! dengan mata sembab hampir menangis !

Ambisi Majudi tidak berhenti begitu saja, waktu baginya terasa berjalan sangat lambat ! Ketika waktu senja melata ke malam hari, pikiran Majudi berbaur dengan mimpi yang melelahkan, seolah bidikan pikirannya tak mau melepaskan sasaran peluang menjadi Kepala BIPP.



Tak puas dengan mimpi yang memang bukan kenyataan. Esoknya, dia telah nongkrong di depan pintu ruang Kepala Dinas tempat mangkalnya bekerja. Niatnya tiada lain, ingin restu, ingin *katabelece* dan sejenisnya.

Di tengah perasaan jemu menunggu yang tak kunjung muncul, tiba-tiba dari arah tak sangka-sangka datang Jumadi menyeruak dengan sejuta serapah !

"Terlalu kamu Jud !" sergah Jumadi, "Kupikir kemarin cuma main-main, nyatanya sekarang ambisimu telah meracuni dan membutakan mata hatimu !"

"Apa salahnya !" balas Majudi, "Bukankah, hak setiap orang untuk memperjuangkan setiap apa yang diinginkannya! Aku tidak ingin hidup tersia-sia, dan membusuk hidup yang terus menerus dalam kemandegan kemelut !"



"Apa kau bilang ?" kembali sergah Jumadi

"Tunggu ! Dengarkan dulu aku bicara", potong Majudi, "Sekarang ini saatnya untuk penyuluh mengatur dirinya sendiri ! Tidak dan bukan oleh orang lain, apalagi oleh mereka yang tidak paham, tidak mengerti tentang dunia kita ! Apa salah bila aku berkehendak, bahwa di tanganku inilah kelak dunia penyuluh ini ku genggam !"

Jumadi terdiam sejenak, ditatapnya Majudi dengan tajam. Entah mengapa Majudi selalu tergetar jika Jumadi diam dan menatap seperti itu. Itu berarti sahabatnya berada pada batas pengendalian dirinya, Apalagi kemudian Jumadi berkata perlahan seolah tanpa emosi.

"Kau sudah jauh berubah ! sudah kemaruk terpuruk arus kemelut apa

yang diperebutkan orang. Kau hanya membayangkan apa yang enaknja saja - mencari posisi yang enak - memukul dari belakang, menendang lawan ketika lengah. Seharusnya kau tidak melupakan, apa yang menjadi tujuan dasarmu, sehingga sederas apapun arus yang menyeretmu - Kau tetap akan kembali pada kesadaranmu, pada jati dirimu, pada komitmen moralmu ! Gonjang-ganjing kita dalam berbagai dinamika arus perubahannya, tidak seharusnya membuat kita berubah pijakan, apalagi merubah apa yang menjadi tujuan dasar kita. Penyuluh adalah penyuluh, pada kapasitas sebagai fungsional dimana dia berada tidak menjadi masalah, tidak harus ribut dalam kemelut. Yang penting peran dan fungsinya hadir dengan ciri kemandiriannya, dengan komitmen moralnya".

Sudah berpuluh kali Jumadi berkata seperti itu, berpuluh kali juga Jumadi dan Majudi berdiskusi pada hal yang sama ! Tapi entah mengapa kali ini kata-kata Jumadi susah di cerna oleh Majudi. Telinganya seolah tuli tak mau mendengar, dia sudah muak dengan berbagai sesorak moral semacam itu - **seharusnya Jumadi mengasingkan diri dipertapaan sepi, menjadi pandita dan bukan ksatria, - gerutu Majudi - baginya pengasingan diri dan menjauhkan diri dari kerumunan orang adalah hidup yang sia-sia, karena kebajikan itu sesungguhnya ada diantara sesama ! -** Karena itu tanpa basa-basi lagi, dengan menyentak, Majudi membalikkan badannya bergerak meninggalkan Jumadi dengan langkah lebar.


"*Tunggu dulu Jud !*" teriak Jumadi, ketika Majudi baru beranjak melangkah, "*Tentang keteguhan memegang tujuan dasar, tentang apa itu yang disebut komitmen moral, seharusnya kau banyak belajar pada Inten ! Inten yang ikut denganku, dan sejak tadi memperhatikan pertengkaran kita di ujung bangunan ini !*" lanjut Jumadi dan tanpa menunggu jawaban Majudi, seolah membalas perlakuan tadi, Jumadi tergesa meninggalkan

Majudi yang masih melongo terbengong-bengong !

Dan ketika Majudi menengok ke ujung bangunan, samar terlihat seseorang berdiri, bersandar pada dinding bangunan dengan mata yang tak lepas-lepas selalu tertuju padanya. Bibirnya tersenyum yang makin lama makin melebar memberi kesejukan pada dadanya yang panas bergelora ! Komunikasi tanpa kata yang terjadi dalam sekejap itu adalah serupa jutaan kata yang seketika mencerahi kesadaran Majudi - **Benar kata Jumadi ! aku harus banyak belajar dari Inten ! senyum itu selamanya tak pernah akan terlupakan dalam benaknya ! Senyum yang tak pernah berubah, menjanjikan sejumlah komitmen moral yang telah lama dibangun dan tak tergoyahkan dalam kondisi apapun, baik suka ataupun duka ! -**

Seolah ada tenaga ajaib, yang menggerakkannya, Majudi menghambur ke arah Inten berdiri, kali ini pun tanpa menghiraukan alam sekelilingnya. Padahal sang Kepala Dinas yang sejak tadi ditunggu kini telah muncul, yang kemudian juga melongo tak mengerti menyaksikan Majudi menghambur ke arah Inten !

andi sumarga



Perpustakaan Badan Peny
Pengembangan Sumber Daya
Pertanian

Ekstensia / BPPSDMP



M0312026